

**EFEKTIVITAS KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA
PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM
MENGHADAPI BENCANA DI KECAMATAN
HAMPARAN PERAK**

Tugas Akhir

Oleh:

MUHAMMAD KUSMITRA
2203110339

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Muhammad Kusmitra

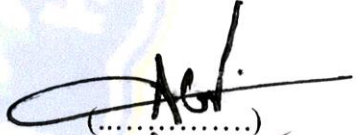
NPM : 2203110339


Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada Hari, tanggal: Kamis, 2 April 2026

Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, M.Ikom. 

PENGUJI II : Nurhasanah Nasution, S.Sos.; M.I.Kom. 

PENGUJI III : Dr. Sigit Hardiyanto, S. Sos., M.I.Kom 

PANITIA PENGUJI

Ketua 

Sekretaris 

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S. Sos., M. SP.

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S. Sos., M.I.Kom.



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh :

Nama : Muhammad Kusmitra
NPM : 2203110339
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Komunikasi Mitigasi Bencana Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana di Kecamatan Hamparan Perak

Medan, 30 Maret 2026

Pembimbing

Dr. Sigit Hardiyanto S.Sos., M.I.Kom.

NIDN : 0112118802

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi

Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom.

NIDN : 127048401



Dekan

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S. Sos., M.SP.

NIDN : 30017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Muhammad Kusmitra**, NPM 2203110339 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 17 April 2026

Yang menyatakan



Muhammad Kusmitra

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas Komunikasi Mitigasi Bencana Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Di Kecamatan Hampan Perak. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan umatnya yang selalu memberikan teladan sepanjang masa. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda sekaligus cinta pertama penulis **Syawal** dan bidadari surgaku, Mama **Inda Yani** yang telah membesarkan, merawat, menyayangi, dan memberikan penulis semangat baik moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dari Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Hanya dengan rahmat-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga mendapatkan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan

segenap ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M. AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Akhyar Anshori, M.I.Kom selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Faizal Hamzah Lubis, M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Leylia Khairani, M.Si selaku Dosen Akademik penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Bapak Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan yang baik, bimbingan, perhatian, pengertian, dan menyisihkan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjalani kuliah.
11. Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu kelengkapan berkas-berkas dan informasi.
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis seluruh Strugel, Shayla salsabila, Rian, Revi, Abin, Idham dan sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang senantiasa memberikan support, informasi, dan saran yang baik kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan, baik dari segi penulisan hingga pembahasan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2026



Muhammad Kusmitra
2203110339

**EFEKTIVITAS KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA
PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN
MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA DI
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

MUHAMMAD KUSMITRA
2203110339

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh tingginya risiko terhadap bencana banjir di Indonesia yang menuntut adanya komunikasi mitigasi bencana yang efektif agar masyarakat mampu memahami risiko serta langkah-langkah penanggulangannya. Namun, dalam praktiknya penyampaian informasi mitigasi bencana masih menghadapi berbagai kendala seperti perbedaan tingkat pendidikan, latar belakang sosial, serta keterbatasan akses informasi yang menyebabkan pesan tidak selalu dipahami secara optimal oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, efektivitas komunikasi mitigasi bencana dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan antar pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat sebagai penerima pesan. Komunikasi yang dilakukan secara jelas, sederhana, dan berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Namun, efektivitas komunikasi mitigasi belum sepenuhnya optimal, karena keterbatasan media komunikasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum meratanya penyampaian informasi.

Kata Kunci: Efektivitas Komunikasi, Kesiapsiagaan Masyarakat, Mitigasi Bencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	8
URAIAN TEORITIS	8
2.1 Komunikasi.....	8
2.2 Efektivitas Komunikasi	10
2.3 Komunikasi Mitigasi Bencana	11
2.4 Peran Pemerintah dalam Komunikasi Mitigasi Bencana	13
2.5 Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap bencana	16

2.6 Hubungan Efektivitas Komunikasi Mitigasi Bencana dengan Kesiapsiagaan Masyarakat	17
2.7 Anggapan Dasar.....	18
BAB III.....	20
METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Kerangka Konsep	20
3.3 Definisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi Penelitian	24
3.5 Narasumber.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Waktu dan Tempat Penelitian	28
BAB IV	30
HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	30
4.2 Deskripsi Fenomena Bencana di Kecamatan Hamparan Perak	33
4.3 Deskripsi Identitas Narasumber	35
4.3.1 Identitas Narasumber BPBD.....	35
4.3.2 Identitas Narasumber Pemerintah Desa	36

4.3.3 Identitas Narasumber Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak.....	38
4.4 Deskripsi Hasil Penelitian	38
4.4.1 Hasil Wawancara BPBD	40
4.4.2 Hasil Wawancara Pemerintah Desa	59
4.4.3 Hasil Wawancara Masyarakat.....	72
4.5 Pembahasan.....	80
4.5.1 Keterbukaan.....	80
4.5.2 Empati.....	81
4.5.3 Sikap Mendukung.....	82
4.5.4 sikap Positif.....	83
4.5.5 Kesetaraan.....	85
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
5.1 Simpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kategorisasi Penelitian	25
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual	21
Gambar 4. 1 Lokasi Kecamatan Hampan Perak Desa Klumpang Kebun	30
Gambar 4. 2 Bencana Banjir Di Kecamatan Hampan Perak Tahun 2025	33
Gambar 4. 3 Sesi Wawancara Dengan BPBD	35
Gambar 4. 4 Sesi Wawancara Dengan Kepala Desa	36
Gambar 4. 5 Sesi Wawancara Dengan Masyarakat	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang cukup tinggi. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik dunia dan memiliki karakteristik alam yang beragam, wilayah yang memiliki garis pantai panjang serta kondisi iklim tropis, mengakibatkan berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan angin puting beliung, yang sering kali terjadi di berbagai daerah. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian material, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, tindakan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrem, kondisi tersebut menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan (Fitrah et al., 2020).

Mitigasi bencana tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi masyarakat. Salah satunya dalam aspek mitigasi bencana adalah komunikasi. Komunikasi mitigasi bencana berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, edukasi serta peringatan kepada masyarakat agar mereka mampu memahami risiko bencana dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dan setelah bencana terjadi. Komunikasi yang efektif diharapkan dapat membentuk kesadaran dan sikap

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Kesiapsiagaan terhadap bencana sangat penting untuk dimiliki seorang individu, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Wicaksono & Husain, 2025).

Namun, dalam pelaksanaannya, komunikasi mitigasi bencana masih menghadapi sejumlah kendala. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Perbedaan tingkat pendidikan, latar belakang sosial budaya, serta keterbatasan akses informasi dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pesan mitigasi bencana. Selain itu, metode dan media komunikasi yang digunakan pemerintah terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan kurang efektif dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Efektivitas komunikasi mitigasi bencana sangat bergantung pada strategi komunikasi yang diterapkan, tanpa adanya strategi yang jelas, penyampaian informasi terhadap masyarakat cenderung tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu, strategi komunikasi juga menghadapi berbagai hambatan, baik secara psikologis maupun sosiologis sehingga edukasi mitigasi bencana perlu disampaikan dengan metode dan media yang sesuai agar masyarakat mampu memahami risiko terhadap bencana (Tanjung et al., 2023).

Kecamatan Hampan Perak merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi rawan bencana, khususnya bencana banjir. Letak geografis wilayah Kecamatan Hampan Perak dipengaruhi oleh kondisi aliran sungai serta curah

hujan yang cukup tinggi menyebabkan sebagian wilayah yang rawan mengalami banjir pada musim hujan. Kondisi tersebut menuntut adanya kesiapsiagaan masyarakat yang baik agar dampak bencana dapat diminimalkan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat mencakup mampu mengenali tanda-tanda bencana banjir, memahami prosedur evakuasi, serta memiliki sikap tanggap dalam menghadapi situasi darurat terhadap bencana banjir. Masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar aliran sungai memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap bencana banjir. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai kesiapsiagaan bencana banjir agar masyarakat mampu menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir.

Dalam konteks ini, komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor paling penting dalam membentuk kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak. Melalui berbagai instansi pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana, baik melalui sosialisasi langsung, penyuluhan maupun media massa dan media sosial. Namun, sejauh ini efektivitas komunikasi masih perlu dikaji lebih lanjut. Tidak semua masyarakat menunjukkan tingkat kesiapsiagaan yang memadai, yang dapat kita lihat masih adanya warga kurang memahami prosedur evakuasi, tidak memiliki rencana darurat keluarga, serta bersikap pasif ketika menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi serta menekan dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Dalam konteks tersebut, kebijakan tata ruang memegang peranan penting

karena berpengaruh terhadap pola pembangunan dan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana (Hasan et al., 2025).

Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat menyebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah efektivitas komunikasi yang belum optimal. Komunikasi mitigasi bencana yang bersifat satu arah, kurang interaktif atau menggunakan bahasa yang sulit dipahami yang dapat menghambat proses pemahaman masyarakat terhadap bencana banjir, selain itu, keberlanjutan penyampaian pesan juga memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat. Informasi mitigasi yang hanya disampaikan pada waktu tertentu, misalnya saat bencana akan terjadi, sering kali tidak cukup untuk membentuk perilaku kesiapsiagaan masyarakat dalam jangka panjang. Masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang berbagai risiko yang dapat mengancam kehidupan mereka. Kondisi ini menuntut adanya kesiapsiagaan masyarakat yang baik untuk mengurangi risiko dan dampak bencana (Marinda & Muttaqin, 2025).

Selain faktor komunikasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat memengaruhi efektivitas komunikasi mitigasi bencana. Apabila masyarakat menilai bahwa informasi yang disampaikan kurang relevan dengan kondisi di lapangan atau tidak sesuai dengan pengalaman mereka, maka pesan tersebut cenderung diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan menyampaikan informasi, tetapi juga dengan bagaimana pesan tersebut dikemas, disampaikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah,

khususnya dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan pemerintah yang mampu memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan memahami efektivitas komunikasi tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi strategi yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan yang diperlukan agar komunikasi mitigasi bencana tepat sasaran.

Penelitian mengenai efektivitas komunikasi mitigasi bencana di Kecamatan Hampan Perak juga penting untuk melihat kondisi nyata di setiap daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga pendekatan komunikasi yang berhasil di satu daerah belum tentu efektif di daerah lain. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana masyarakat di Kecamatan Hampan Perak menerima dan merespon pesan-pesan mitigasi bencana yang disampaikan oleh pemerintah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi kebencanaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik yang sama serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pihak terkait dalam menyusun strategi komunikasi mitigasi bencana yang lebih efektif. Dengan komunikasi yang tepat dan efektif, diharapkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dapat meningkat, sehingga risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi mitigasi bencana pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, khususnya di Kecamatan Hamparan Perak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada satu permasalahan utama, yaitu tentang efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak. Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana proses penyampaian informasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas komunikasi mitigasi bencana pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kecamatan Hamparan Perak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis adalah bentuk persyaratan untuk memenuhi kewajiban dalam menyusun tugas akhir pada jenjang strata satu (S1) program studi ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Muhammadiyah sumatera utara.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis adalah untuk melihat gambaran lapangan secara umum dan nyata dengan mengaitkan teori-teori komunikasi yang didapatkan selama perkuliahan dan memperkaya kajian ilmu komunikasi bencana, khususnya efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak.

3. Manfaat Praktis

Secara manfaat praktis diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengasah pembelajaran dan sekaligus menjadi wadah bagi peneliti untuk kemampuan teori komunikasi bencana ke dalam praktik nyata khususnya dalam konteks kesiapsiagaan masyarakat dalam meghadapi bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang membuat terjadinya interaksi sosial dan saling berbagi pemahaman bersama antara individu maupun kelompok. Secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator dengan komunikan melalui saluran tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan dampak perubahan, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi tetapi juga bisa menimbulkan kesadaran, mempengaruhi cara berpikir, dan juga mengarahkan tindakan bersama dalam kehidupan sosial.

Menurut pandangan Lasswell tentang komunikasi yang menekankan unsur pembicaraan, pesan, dan khalayak, tetapi teori ini menggunakan istilah yang berbeda. Komunikasi sebagai proses satu arah di mana seorang individu memengaruhi orang lain melalui pesan. Lasswell menawarkan definisi yang lebih luas mengenai saluran yang memasukkan media massa bersamaan dengan pidato sebagai bagian dari proses komunikasi. Menyediakan satu arah pandangan yang lebih luas mengenai tujuan atau dampak komunikasi dibandingkan perspektif Aristotelian. Model Lasswell sangat relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara langsung bagaimana pesan mitigasi bencana disampaikan oleh pemerintah yang disalurkan melalui media pesan apa dan sejauh mana dampak kesiapsagaan terhadap masyarakat.

Komunikasi juga dapat dipahami sebagai proses penyampaian makna yang tidak selalu berjalan dengan bebas hambatan. Menurut Shannon dan Weaver komunikasi sebagai sumber informasi yang memilih salah satu pesan yang diinginkan dari banyaknya pesan yang tersedia. Pesan yang akan dipilih itu berisi kata-kata tertulis atau gambar mengubah pesan menjadi sinyal yang sebenarnya yang dikirim melalui saluran komunikasi dari komunikator ke komunikan. Dalam konteks komunikasi mitigasi bencana, gangguan yang sering kali terjadi pada komunikasi muncul akibat penggunaan komunikasi yang sulit dipahami masyarakat atau keterbatasan akses terhadap media informasi.

Selain itu Schramm menekankan komunikasi sebagai upaya yang disengaja untuk membentuk kesamaan antara sumber dan penerima pesan. Dengan catatan bahwa komunikasi berasal dari kata latin yang artinya “Bersama”. Membangun kesamaan dengan penerima pesan yang tepat, untuk itu mengambil informasi yang diinginkan. Pemahaman tentang model komunikasi ini menjadi penting dalam komunikasi mitigasi bencana, karena masyarakat memiliki latar belakang yang beragam alam memahami ancaman terhadap bencana (Ruliana & Lestari, 2019).

Dengan demikian, komunikasi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi semata-mata, melainkan sebagai proses yang bertujuan untuk membentuk pemahaman, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Keberhasilan komunikasi sangat diperlukan untuk kejelasan pesan, ketepatan media yang digunakan. Serta kemampuan informasi pemerintah daerah tersebut untuk dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi menjadi dasar yang sangat penting untuk mengkaji sejauh mana

mitigasi bencana yang diperlukan oleh pemerintah mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir.

2.2 Efektivitas Komunikasi

Efektivitas komunikasi menunjukkan pada tingkat proses penyampaian informasi mampu memberikan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah yang menyampaikan informasi. Komunikasi dapat dikatakan efektif ketika informasi yang disampaikan dapat diterima, dipahami, serta memberikan dampak yang sesuai dengan harapan, baik dalam bentuk perubahan, sikap, maupun perilaku masyarakat. Komunikasi dianggap efektif jika pesan yang disampaikan berhasil mendapat tanggapan atau tindakan yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat (Akbar & Yuliana, 2023).

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu berikan kemudahan bagi penerima pesan dalam memahami informasi yang disampaikan. Efektivitas komunikasi dapat terwujud apabila terdapat kesamaan pemahaman antar komunikator dan komunikan melalui penggunaan Bahasa yang jelas, lengkap, dan mudah dimengerti (Hardiyanto & Pulungan, 2019).

Ada beberapa unsur penting dalam efektivitas komunikasi seperti keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan antar komunikator dan komunikan yang membantu komunikasi yang kondusif, berikut merupakan unsur dari efektivitas komunikasi yaitu:

Dari unsur-unsur tersebut, merupakan pondasi utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Jika diterapkan secara konsisten, komunikasi tidak hanya

berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman, kepercayaan, dan hubungan sosial yang harmonis.

Dalam konteks mitigasi bencana, efektivitas komunikasi menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Dalam konteks komunikasi mitigasi bencana, efektivitas komunikasi menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat dipengaruhi dengan cara menyampaikan informasi mitigasi yang diberikan. Informasi terkait risiko bencana, upaya pencegahan, serta tata cara evakuasi perlu disampaikan dengan bahasa yang jelas, mudah dimengerti, dan disesuaikan dengan situasi serta latar belakang masyarakat setempat. Apabila komunikasi mitigasi dilakukan secara efektif, maka masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi ancaman banjir.

2.3 Komunikasi Mitigasi Bencana

Komunikasi mitigasi bencana merupakan proses penyampaian informasi yang berkaitan dengan risiko, ancaman, dan upaya pengurangan terhadap dampak bencana kepada masyarakat. Komunikasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui potensi bahaya yang dapat terjadi juga serta langkah-langkah yang diperlukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu upaya dengan tujuan mengurangi, mencegah dampak dari bencana alam. Pentingnya mitigasi bencana mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan manusia dan lingkungan (Yunia et al., 2024).

Dalam konteks pengambilan keputusan, pendekatan Teori OODA Loops yang merupakan konsep analisis yang berulang untuk menetapkan suatu keputusan terhadap suatu masalah, OODA Loops merupakan singkatan dari *Observe*, *Orient*, *Decide*, dan *Act*. Dan istilah dari Loops dalam konsep ini, seluruh proses akan dilakukan secara berulang, sehingga keputusan yang di ambil mampu memberikan dampak yang cukup signifikan dan efektif dalam menghadapi masalah, salah satunya masalah yang dihadapi adalah bencana banjir.

Tahap *Observe* berkaitan dengan pengamatan terhadap situasi yang akan terjadi, *Orient* pada proses analisis dan pemahaman konteks, *Decide* pada bagian penentuan keputusan yang akan di ambil, dan yang terakhir *Act* sebagai pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam menghadapi bencana banjir, model ini membantu pihak terkait untuk merepons secara cepat dan adaptif sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan (Fahmid & Syaugi, 2021).

Tujuan utama dari komunikasi mitigasi bencana adalah untuk membutuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Melalui komunikasi yang tepat, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui informasi bencana, tetapi juga mampu untuk bersikap lebih waspada, tenang, dan mengambil tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi bencana. Mengubah pola pikir masyarakat untuk dapat menciptakan budaya keselamatan melalui kebiasaan dan kesiapsiagaan dalam pencegahan bencana (Taslim et al., 2024).

Komunikasi bencana merupakan proses penyampaian informasi yang terstruktur, terencana dan berkelanjutan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap

bencana banjir (Faustyna et al., 2021). Komunikasi mitigasi bencana tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga menyampaikan sesuai dengan cara bahasa, dan pendekatan komunikasi kepada masyarakat (Rudianto & Anshori, 2021).

Bentuk komunikasi mitigasi bencana dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat, penyuluhan, simulasi bencana, serta pemanfaatan media massa dan media sosial. Pemilihan dengan menggunakan metode dan media komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta tingkat pemahaman masyarakat agar nantinya informasi yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Dengan Komunikasi mitigasi bencana Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan ketika sebelum bencana terjadi (Fernanda & Harahap, 2024).

Komunikasi mitigasi bencana memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung yang tepat antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Komunikasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami risiko yang dihadapi, mengetahui cara untuk melakukan keselamatan dan membentuk perilaku yang lebih siap dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Pada dasarnya mitigasi merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan meminimalisir dampak terhadap bencana mulai dari korban jiwa sampai berdampak pada aspek ekonomi (Sopacua & Salakay, 2020).

2.4 Peran Pemerintah dalam Komunikasi Mitigasi Bencana

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi mitigasi bencana, karena pemerintah bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat. Dalam konteks kebencanaan, pemerintah tidak

hanya berfungsi sebagai pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sumber utama informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai ancaman bencana, tingginya risiko yang akan dihadapi, serta langkah-langkah yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang memberikan rasa aman terhadap mitigasi bencana, khususnya bencana banjir yang menjadi perhatian khusus apabila sedang musim hujan di setiap daerah tertentu (Permana, 2023).

Dalam mitigasi bencana peran pemerintah dalam komunikasi mitigasi bencana dapat dilihat dari upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui komunikasi yang berkelanjutan. Pemerintah berupaya membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, informasi yang disampaikan pemerintah tidak hanya bersifat peringatan tetapi juga mencakup edukasi tentang tindakan pencegahan, tata cara penyelamatan diri, serta bagaimana evakuasi yang akan dilakukan dalam situasi darurat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang tepat ketika terjadinya bencana. Dalam melaksanakan mitigasi bencana masyarakat akan dilatih bagaimana masyarakat bisa menjaga lingkungan seperti sosialisasi, pelatihan dengan ekspetasi *go green* (Izharsyah et al., 2020).

Selain memberikan edukasi, pemerintah juga berperan sebagai komunikator yang menjembatani kepentingan antara kebijakan penanggulangan bencana dan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah perlu menyesuaikan pesan mitigasi bencana

dengan karakteristik sosial, budaya, dan tingkat pemahaman masyarakat setempat. penyampaian informasi dengan bahasa yang terlalu sulit dipahami justru dapat menghambat proses komunikasi, Maka dari itu, penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan konteks masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan komunikasi mitigasi bencana. Peran pemerintah mempersiapkan mitigasi bencana sebagai langkah yang strategis untuk melindungi kehidupan, infrastruktur, dan lingkungan. Dengan demikian penting mitigasi bencana mencapai pencegahan kerugian besar sebelum bencana terjadi (Nawi & Herianto, 2020).

Peran pemerintah dalam komunikasi mitigasi bencana juga mencakup pemilihan media dan metode komunikasi yang tepat. Pemerintah dapat memanfaatkan saluran komunikasi seperti, sosialisasi langsung, penyuluhan kepada masyarakat, serta penggunaan media massa dan media sosial. Pemanfaatan media yang beragam dengan tujuan agar pesan mitigasi bencana dapat menjangkau ke seluruh masyarakat, Termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi. Dengan menyampaikan pesan yang berulang dan konsisten, dapat diharapkan masyarakat memahami risiko bencana dan terdorong untuk bersikap lebih waspada.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa, peran pemerintah dalam komunikasi mitigasi bencana tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan komunikasi yang mampu membentuk kesadaran masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah secara terencana, jelas akan membantu masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu,

keberhasilan mitigasi bencana sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjalankan perannya secara efektif dalam membangun komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

2.5 Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap bencana

Kesiapsiagaan dipahami sebagai hasil dari proses penyampaian, penerima, dan pemaknaan informasi kebencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan antara pemerintah lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat. Kesiapsiagaan tidak muncul secara spontan, melainkan dibentuk dengan komunikasi yang terencana, jelas, dan mudah dipahami masyarakat sebagai penerima pesan. Kesiapsiagaan bencana yang efektif melibatkan peran aktif masyarakat setempat sebagai bentuk komunikasi bencana, komunikasi dapat menjadi sangat mendesak dan diperlukan dalam keadaan darurat (Aziz, 2023).

Selain kejelasan pesan, kredibilitas komunikator juga mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat. Pemerintah daerah, badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tokoh utama masyarakat sebagai sumber informasi apabila masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sumber informasi, maka pesan kebencanaan yang disampaikan akan lebih mudah diterima sehingga mendorong terbentuknya sikap waspada dan kesiapan terhadap bencana.

Kesiapsiagaan masyarakat melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku, masyarakat jadi memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap risiko bencana. Secara perilaku, masyarakat mampu mengambil tindakan seperti evakuasi, menyiapkan perlengkapan darurat, serta mematuhi instruksi evakuasi ketika bencana terjadi. Faktor pengetahuan masyarakat merupakan faktor dominan

yang berpengaruh terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (Husniawati & Herawati, 2023).

Dengan demikian kesiapsiagaan masyarakat dapat diposisikan sebagai indikator keberhasilan komunikasi bencana. Semakin baik kualitas komunikasinya maka semakin tinggi pula kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Kesiapsiagaan yang terbentuk melalui komunikasi yang efektif, akan berkontribusi pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.

2.6 Hubungan Efektivitas Komunikasi Mitigasi Bencana dengan Kesiapsiagaan Masyarakat

Efektivitas komunikasi mitigasi bencana memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Komunikasi mitigasi bencana berfungsi sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi mengenai ancaman bencana, risiko bencana, dan juga langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat. Ketika komunikasi disampaikan dengan jelas dan tepat sasaran maka pesan mitigasi bencana akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Komunikasi mitigasi bencana yang efektif mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap risiko bencana. Melalui informasi yang akurat, masyarakat menjadi lebih memahami penyebab bencana, tanda-tanda awal terjadinya bencana, dan tindakan yang perlu dilakukan sebelum dan sesaat bencana terjadi. Pemahaman ini menjadi dasar terbentuknya sikap waspada dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Selain itu, efektivitas komunikasi juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat, melalui komunikasi yang bersifat persuasif dan partisipatif yang dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan mitigasi, seperti mengikuti sosialisasi, evakuasi, menjaga lingkungan, serta mematuhi arahan pihak pemerintah. Dengan demikian, masyarakat mampu menggerakkan tindakan nyata dalam kesiapsiagaan terhadap bencana.

Meningkatkan kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat memiliki urgensi yang sangat tinggi. Perubahan cuaca yang semakin nyata, memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan perubahan positif, Edukasi yang tepat dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mengurangi dampak terjadinya bencana (Farihin, 2023).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, semakin efektif komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah, maka semakin tinggi juga kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Hubungan ini menunjukkan bahwa komunikasi mitigasi bencana merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi risiko bencana, khususnya bencana banjir.

2.7 Anggapan Dasar

Penelitian ini didasarkan bahwa komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir. Komunikasi yang efektif, jelas, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di Kecamatan

Hampan Perak diyakini mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta sikap waspada masyarakat terhadap risiko bencana banjir.

Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat tidak muncul secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses komunikasi mitigasi bencana yang berkelanjutan. Oleh karena itu semakin efektif komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin tinggi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak.

BAB III

METODE PENELITIAN

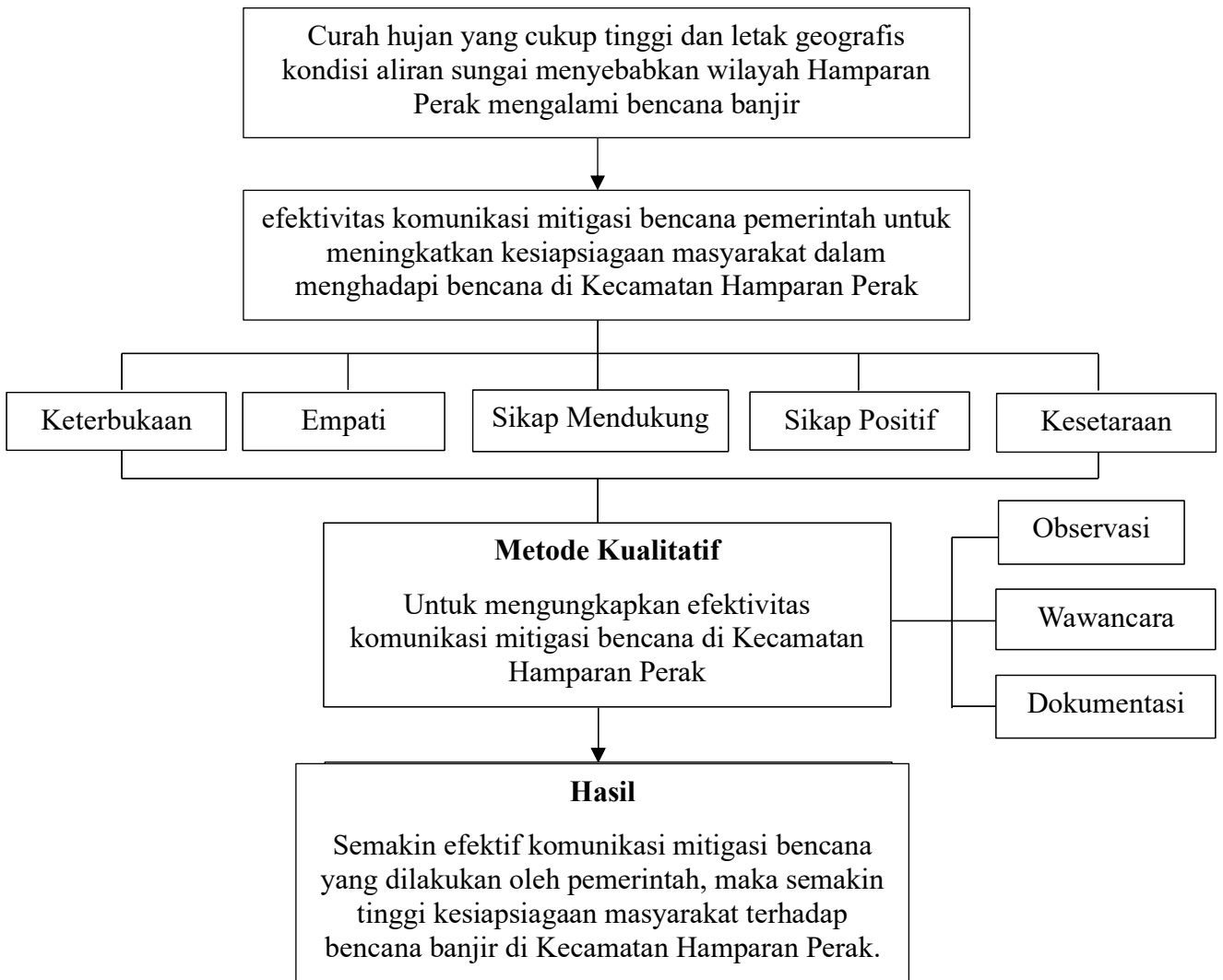
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, mengungkap fenomena, serta peristiwa bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Hampan Perak. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan usaha untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang terjadi dan mendapatkan informasi lebih mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi (Muri Yusuf, 2014).

Dengan menggunakan metode ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar alur berpikir peneliti dalam memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti tanpa menggunakan hipotesis, karena penelitian bersifat kualitatif. Kerangka konsep berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan antar fokus penelitian, yaitu efektivitas komunikasi mitigasi bencana pemerintah yang dilihat melalui unsur keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian, kerangka konsep menjadi panduan dalam proses pengumpulan dan analisis data agar penelitian tetap terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Olahan Penelitian, 2026

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian meliputi efektivitas komunikasi mitigasi bencana pemerintah dan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak. Efektivitas komunikasi mitigasi bencana pemerintah dalam penelitian ini dipahami beberapa unsur komunikasi efektif, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap

positif, kesetaraan dan bagaimana kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak menghadapi bencana banjir. Adapun definisi masing-masing konsep dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas Komunikasi Mitigasi Bencana Pemerintah

Efektivitas komunikasi mitigasi bencana pemerintah dalam penelitian diartikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan mitigasi bencana banjir kepada masyarakat Kecamatan Hamparan Perak sehingga pesan dapat diterima dengan baik, dipahami, dan mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat. Efektivitas komunikasi mitigasi bencana tidak hanya dilihat dari tersampainya informasi kepada masyarakat, tetapi juga dari kemampuan komunikasi tersebut untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan perubahan sikap masyarakat terhadap risiko bencana banjir.

2. Keterbukaan

Keterbukaan dalam komunikasi mitigasi bencana pemerintah merupakan sikap transparansi dan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya penutupan atau distorsi pesan, serta disertai kesediaan untuk menerima tanggapan, pertanyaan, dan masukan dari masyarakat. Keterbukaan ini memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah yang efektif, sehingga informasi terkait risiko, pencegahan, dan penanganan bencana banjir dapat dipahami secara jelas dan menyeluruh. Selain itu, keterbukaan juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi potensi kesalahpahaman, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat

dalam upaya mitigasi bencana, sehingga pada akhirnya meningkatkan efektivitas komunikasi yang dilakukan.

3. Empati

Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, sudut pandang, dan kondisi kepada pihak lain dalam proses komunikasi. Unsur ini sangat penting karena komunikasi tidak hanya berkaitan dengan pesan verbal, tetapi juga emosional yang didapat, menyesuaikan bahasa, intonasi dan cara penyampaian yang didapat agar tidak melukai atau menyinggung komunikan.

4. Sikap Mendukung

Sikap mendukung ditunjukkan melalui komunikasi yang tidak merendahkan dan tidak bersifat menyerang. Dalam komunikasi efektif, komunikator berusaha menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi komunikan yang menyampaikan pesan. Dukungan dapat berupa kata-kata penguatan, bahasa tubuh yang ramah, dan respon yang baik. Dengan adanya dukungan komunikasi menjadi lebih sehat dan produktif.

5. Sikap Positif

Mencerminkan pandangan optimis terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam berkomunikasi. Komunikator memiliki sikap positif cenderung menggunakan bahasa yang membangun, menghargai pendapat, dan fokus pada solusi daripada membuat terjadinya konflik. Sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan motivasi komunikan untuk terus aktif dalam berkomunikasi sehingga tujuan lebih mudah tercapai.

6. Kesetaraan

Kesetaraan komunikator dan komunikan memiliki kedudukan yang sama sebagaimana khalayaknya manusia. Meskipun berbeda peran, status, atau latar belakang. Dalam komunikasi yang efektif tidak ada pihak yang merasa lebih rendah ataupun lebih tinggi, sikap mendorong satu sama lain, saling menghargai, mendengar, dan memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Kesetaraan ini sangat penting agar komunikasi tidak bersifat satu arah.

7. Kesiapsiagaan Masyarakat

Kesiapsiagaan masyarakat dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi kesiapan masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak dalam menghadapi bencana banjir, yang tercermin dari pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap risiko bencana banjir. Kesiapsiagaan meliputi kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda banjir, memahami prosedur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat, serta bersikap tanggap terhadap peringatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kesiapsiagaan masyarakat dipandang sebagai hasil dari proses komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan oleh pemerintah.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan data hasil temuan lapangan ke dalam tema-tema tertentu agar lebih mudah dianalisis dan dipahami secara sistematis. Dalam konteks penelitian kualitatif, kategorisasi dilakukan dengan mengacu pada fokus penelitian, yaitu efektivitas komunikasi mitigasi bencana pemerintah yang dijabarkan ke dalam unsur keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Setiap data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disusun ke dalam kategori tersebut, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, makna, serta

hubungan antar temuan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan mendalam.

Tabel 3.1. Kategorisasi Penelitian

Konsep Teoritis	Indikator
Efektivitas Komunikasi Mitigasi	1. Keterbukaan
Bencana Pemerintah Untuk	2. Empati
Meningkatkan Kesiapsiagaan	3. Sikap Mendukung
Masyarakat Dalam Menghadapi	4. Sikap Positif
Bencana Di Kecamatan Hampan Perak	5. Kesetaraan

Sumber: Hasil Olahan, 2026

3.5 Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan mitigasi bencana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak. Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kecamatan Hampan Perak.
2. Masyarakat Kecamatan Hampan Perak, khususnya yang tinggal di wilayah rawan banjir, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan partisipan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, serta persepsi individu mengenai fenomena yang dikaji. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melakukan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber (Riskiono et al., 2020). Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur artinya dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan penelitian yang disusun di dalam draft pedoman wawancara berdasarkan rumusan masalah yang diteliti untuk mengungkap realitas fenomena yang mendeskripsikan tentang efektivitas komunikasi mitigasi bencana pemerintah dalam membentuk kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

2. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung terhadap perilaku, interaksi sosial, dan situasi yang terjadi dengan fenomena penelitian. Observasi

dilakukan secara non-partisipan, yang artinya peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Hampan Perak, melainkan peneliti hanya mengamati aktivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Hampan Perak. Observasi merupakan studi yang dilakukan diluar ruangan yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan (Nikmah, 2023).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari arsip, laporan, kegiatan foto, yang dilakukan secara relevan dengan objek penelitian. Kegiatan dokumentasi umumnya dipahami sebagai aktivitas merekam atau menyimpan suatu peristiwa melalui media seperti kamera. Dokumentasi berfungsi untuk mencatat dan mengarsipkan berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peneliti (Fitriani, 2023).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan penyeleksian, memfokuskan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Bukan sekedar proses pemulihan data melainkan suatu analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,

dan mengordinasikan data pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif dengan tujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan bagi peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi, tabel, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan fenomena yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh, kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan cara membandingkan data lapangan dan teori yang digunakan, sehingga peneliti dapat menjawab rumusan masalah secara cepat. Tujuan dari kesimpulan untuk menentukan langkah selanjutnya untuk memperoleh hasil dari data yang diperoleh (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

3.8 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan Lokasi dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi wilayah Kecamatan Hamparan Perak yang termasuk daerah rawan banjir akibat faktor curah hujan yang cukup tinggi serta kondisi geografis yang dipengaruhi oleh aliran sungai. Selain itu, wilayah ini menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir.

Waktu penelitian dilaksanakan bulan Januari 2026 sampai dengan selesai, rentang waktu tersebut digunakan untuk seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari tahap persiapan penelitian, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, hingga tahap pengolahan serta analisis data. Penentuan penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian deskriptif kualitatif yang memerlukan pengamatan dan penggalian data serta secara mendalam agar diperoleh informasi yang komprehensif mengenai efektivitas komunikasi mitigasi bencana di Kecamatan Hampan Perak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian



Gambar 4. 1 Lokasi Kecamatan Hamparan Perak Desa Klumpang Kebun

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2025

001: Tandam Hulu Dua	011: Tandam Hilir Dua
002: Kampung Tandam Hulu Satu	012: Kota Datar
003: Paya Bakung	013: Kota Rantang
004: Klambir Lima Kampung	014: Kampung Lama
005: Klambir Lima Kebon	015: Klambir
006: Klumpang Kebon	016: Kampung Selemak
007: Klumpang Kampung	017: Hamparan Perak
008: Sialang Muda	018: Sungai Baharu
009: Bulu Cina	019: Paluh Manan
010: Tandam Hilir Satu	020: Paluh Kurau

Kecamatan Hamparan Perak merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang yang ada di provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini terletak yang tidak terlalu jauh di Kota Medan, sehingga memiliki posisi yang cukup strategis. Sebagian wilayah di kecamatan Hamparan Perak berbatasan langsung dengan Kota Medan perkembangan aktivitas masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak cukup dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang ada di Kota Medan. Oleh karena itu, wilayah Kecamatan Hamparan Perak memiliki karakter yang cukup unik, yaitu perpaduan antara daerah pedesaan dengan wilayah yang mulai berkembang seperti kawasan perkotaan Kota Medan (Suharyadi, 2025).

Secara umum, Kecamatan Hamparan Perak terdiri dari beberapa desa dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam. Aktivitas masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak ini cukup dinamis, karena sebagian besar penduduk masyarakat Kecamatan Hamparan Perak bekerja di sektor pertanian, perdagangan, buruh, serta usaha kecil dan menengah. Selain itu juga, terdapat juga masyarakat yang bekerja di Kota Medan, namun tinggal di Kecamatan Hamparan Perak. Kondisi ini menjadikan wilayah ini menjadi mobilitas masyarakat yang cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Kecamatan Hamparan Perak dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana banjir terutama pada musim hujan terjadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis Kecamatan Hamparan Perak relatif datar serta adanya beberapa aliran sungai yang melintasi wilayah di kawasan tersebut, ketika hujan deras, air sungai sering kali meluap yang menyebabkan genangan air di beberapa permukiman masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak. Selain itu juga,

kondisi saluran air di beberapa wilayah Kecamatan Hampan Perak belum optimal sehingga memperparah terjadinya banjir.

Penelitian ini dilakukan karena, di Kecamatan Hampan Perak dianggap relevan dengan fokus penelitian mengenai komunikasi mitigasi bencana banjir. Dalam proses ini juga, peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan, untuk melihat kondisi lingkungan di Kecamatan Hampan Perak serta aktivitas masyarakat. Selain itu juga, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dengan narasumber seperti pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Pemerintah Desa, dan masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Hampan Perak yang rawan banjir.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran langsung mengenai, bagaimana komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat serta sejauh mana masyarakat memahami informasi yang diberikan terkait kesiapsiagaan menghadapi banjir yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang cukup relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

4.2 Deskripsi Fenomena Bencana di Kecamatan Hamparan Perak



Gambar 4. 2 Bencana Banjir Di Kecamatan Hamparan Perak Tahun 2025

Sumber: Mistar.id Selasa, 26 November 2025

Fenomena bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada tanggal 26 November 2025 yang merupakan salah satu bencana alam cukup besar yang melanda beberapa wilayah di Kecamatan Hamparan Perak tersebut. Banjir ini dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari berturut-turut di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, air mulai memasuki permukiman warga di sekitar wilayah Kecamatan Hamparan Perak ketika hujan lebat turun secara terus-menerus.

Sungai yang tidak mampu menampung debit air sungai yang pada akhirnya meluap dan merendam beberapa wilayah di Kecamatan Hamparan Perak. Beberapa desa yang terdampak di antaranya Desa Kota Rantang, Desa Lama, desa Paya Bakung, Desa Klumpang Kebun dan Desa Klambir Lima Kampung, dengan ketinggian air di wilayah ini bahkan mencapai lutut hingga pinggang orang dewasa, sehingga aktivitas masyarakat menjadi lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak

warga terpaksa mengungsi ke tempat masjid-mesjid yang lebih aman karena rumah mereka tidak dapat ditempati lagi.

Banjir ini tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi berdampak juga di berbagai infrastruktur. Beberapa jalan rusak akibat banjir dan ada pula jembatan penghubung antarwilayah mengalami kerusakan yang cukup parah karena derasnya aliran sungai yang meluap. Kondisi tersebut mempersulit proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak, sebagian warga bahkan harus berjalan cukup jauh untuk melewati genangan air untuk mencapai tempat pengungsian.

Dampak dari bencana banjir ini cukup besar, ratusan rumah warga terendam banjir. Selain kerugian materiil, banjir juga menyebabkan korban jiwa serta memaksa banyak warga meninggalkan rumah mereka untuk sementara waktu, para pengungsi membutuhkan berbagai bantuan seperti makanan, air bersih, pakaian, serta layanan kesehatan.

Banjir di Kecamatan Hampan Perak menunjukkan bahwa besarnya dampak dari cuaca yang cukup ekstrem dan curah hujan yang cukup tinggi terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar di Kecamatan Hampan Perak. Selain faktor alam, beberapa pihak juga menilai bahwa kondisi lingkungan seperti perubahan tata guna lahan dan sistem drainase yang kurang baik, turut memperparah dampak banjir. Oleh karena itu penanganan darurat sangat diperlukan dengan jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak dimasa yang akan datang.

4.3 Deskripsi Identitas Narasumber

4.3.1 Identitas Narasumber BPBD (Narasumber 1)



Gambar 4. 3 Sesi Wawancara Dengan BPBD

Sumber: Dokumentasi Olahan Penelitian, 2026

Narasumber pertama dalam penelitian ini berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Narasumber tersebut dengan nama Bapak Edi Jamian Nasution S.E yang berusia 57 Tahun. Dan saat ini beliau menjabat sebagai kepala bidang kedaruratan dan logistik di BPBD. Dengan jabatannya tersebut beliau memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai kondisi kedaruratan bencana dan mengordinasikan kebutuhan logistic Ketika bencana banjir di wilayah yang menjadi tanggung jawab BPBD Kabupaten Deli Serdang.

Bapak Edi memiliki latar belakang Pendidikan strata satu (S1) di bidang ekonomi. Dengan pengalaman kerja dan tanggung jawab yang dimilikinya di BPBD, dan beliau juga memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai

penanggulangan bencana, khususnya dalam penanganan situasi darurat serta penyampaian informasi kepada masyarakat dalam kebencanaan.

Oleh karena itu, Bapak Edi Jamian Nasution dipilih sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini karena dianggap memiliki pemahaman yang cukup relevan mengenai komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Dan informasi yang diberikan oleh beliau diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami bagaimana proses penyampaian pesan mitigasi bencana kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak.

4.3.2 Identitas Narasumber Pemerintah Desa (Narasumber 2)



Gambar 4. 4 Sesi Wawancara Dengan Kepala Desa

Sumber: Dokumentasi Olahan Penelitian, 2026

Selanjutnya narasumber dalam penelitian ini berasal dari unsur pemerintah desa, yaitu Kepala Desa Kelumpang Kebun di Kecamatan Hamparan Perak. Narasumber tersebut bernama Bapak Aidil Firi yang berusia 48 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Desa Kelumpang Kebun yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa serta

mengoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana banjir di wilayah desa.

Bapak Aidil Firi memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun demikian, melalui pengalaman dan tanggung jawab yang dijalankan sebagai kepala desa, beliau memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kondisi wilayah serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menghadapi potensi bencana banjir. Dalam menjalankan tugasnya, beliau juga berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mengoordinasikan perangkat desa dan kepala dusun dalam upaya menjaga kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Oleh karena itu, Bapak Aidil Firi dipilih sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah desa. Informasi yang diberikan oleh beliau diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami bagaimana proses penyampaian informasi mitigasi bencana kepada masyarakat serta bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak.

4.3.3 Identitas Narasumber Masyarakat (Narasumber 3)



Gambar 4. 5 Sesi Wawancara Dengan Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Olahan Penelitian, 2026

Narasumber selanjutnya dalam penelitian ini yaitu Bapak Dedi Rosadi dengan usia 56 tahun. Beliau merupakan salah satu masyarakat yang tinggal di Kecamatan Hampan Perak. Adapun pendidikan terakhir beliau adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). Dengan pengalaman hidup dan kedekatannya dengan lingkungan sekitar, beliau menjadi salah satu narasumber yang relevan dalam memberikan informasi mengenai komunikasi mitigasi bencana banjir.

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti memaparkan serta menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini,

peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Dengan melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi secara rinci dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan serta keterkaitan langsung dengan topik penelitian, selain itu juga, peneliti melakukan dokumentasi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan salah satu wilayah yang cukup rentan terhadap bencana banjir. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan koordinasi serta meminta izin kepada pihak-pihak terkait agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang telah ditentukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Narasumber tersebut terdiri dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Desa, di Kecamatan Hampan Perak, serta masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi terdampak banjir. Pemilihan narasumber ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masyarakat memahami dan merespon informasi tersebut.

4.4.1 Hasil Wawancara Narasumber 1

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggali informasi terkait permasalahan yang telah dijelaskan pada bab 1, yaitu mengenai efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak. Menyampaikan informasi mengenai potensi bencana dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan masyarakat menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat memahami serta bersikap lebih siap Ketika menghadapi bencana banjir. Oleh karena itu, Ketika peneliti menanyakan bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir kepada masyarakat di Kecamatan Hampan Perak, menurut narasumber 1 sebagai berikut:

“Dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir kepada masyarakat di Kecamatan Hampan Perak, keterbukaan kita pertama, pertama kita ada beli BNKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofika), daerah yang bakal banjir pokok nya hujan akan mengalami banjir termasuk di daerah Deli Serdang satu. Deli Serdang itu, kita sudah antisipasi seperti Kecamatan Hampan Perak karena Kecamatan Hampan Perak sudah setiap tahun, nanti kita sampaikan ke satgas kita, pertama kita bikin surat dulu, lalu kita sampaikan kepada kepala desa pemerintah, kepala desa baru kepada kecamatan bahwa tanggal sekian ada informasi BMKG akan mengalami hujan deras dan akan banjir, itulah agar kepala desa dan Kecamatan menyampaikan kepada masyarakat ke bawa, bagaimana pesan BMKG ini sampai kepada masyarakat dan kita pun ada subjek kita, ada yang di sediakan kecamatan, contohnya Kecamatan Hampan Perak ada yang di sediakan di sekitar. Nanti mereka yang duluan kesana menyampaikan kepada pemerintah desa agar bersiap-siap untuk menghadapi bakal ada

banjir. Contoh, apa yang kita contohkan seperti 2025 yang lalu bulan 11 september. Seperti di Hamparan Perak kan, kita sudah mendengar banjir rob air itu sudah naik, cuman kita sampaikan kepada satgas, menyampaikan kepada pemerintah desa, pemerintah desa menganggap (“ah biasa itu” kalau banjir rob itu sama kami biasa besok keringnya itu). Rupanya kali ini, hujan di gunung, nah air itu kan turun ruapnya di hamparan Perak itu besoknya air melimpah kesana semua, Hamparan Perak ini kan airnya dari hilir ke hulu, jadi Nampak buangan terakhir kerana Kecamatan Hamparan Perak itukan apanya laut, jadi pesan kita bentuk keterbukaan pemerintah itu, iya kita sampaikan kepada pemerintah desa, kepada pemerintah kecamatan, baru nanti merekalah yang menyampaikan kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat diketahui bahwa keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Informasi mengenai potensi terjadinya hujan deras dan kemungkinan banjir terlebih dahulu diperoleh dari BMKG, kemudian disampaikan oleh BPBD kepada satuan satgas yang ada dilapangan. Selanjutnya BPBD mengirimkan pemberitahuan kepada Pemerintah Desa dan pihak Kecamatan Hamparan Perak agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat. Proses menyampaikan informasi ini bertujuan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana banjir. Namun dalam praktiknya, terkadang masih terdapat masyarakat atau Pemerintah Desa yang menganggap kondisi tersebut sebagai hal yang biasa sehingga kurang memperhatikan peringatan yang disampaikan.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi dari pemerintah menjadi hal penting agar masyarakat dapat memahami potensi bencana dan meningkatkan

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan masih belum sepenuhnya efektif, sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas komunikasi yang menekankan pentingnya kejelasan pesan dan keberlanjutan informasi.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai keterbatasan komunikasi yang mempengaruhi penyampaian informasi mitigasi bencana kepada masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak. Keterbatasan komunikasi karena berbagai faktor, seperti perbedaan tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan yang disampaikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi bagaimana informasi mitigasi bencana diterima dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, Ketika peneliti menanyakan bagaimana keterbatasan komunikasi mempengaruhi penyampaian informasi mitigasi bencana kepada masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak, informasi dari BPBD narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau keterbatasan informasi kita, iya kita sebatas untuk kepada desa dan Kecamatan, kalau untuk kepada seluruh masyarakat iya itu kepala desa. Perannya memang kita sampai sekarang belum ada komunikasi yang alat komunikasi untuk menyampaikan kepada masyarakat “nanti paling ya”, komunikasi ini kepala desa sampai, kita sampaikan kepala-kepala desa, camat, nanti kepala desa menyampaikan kepada masyarakat komunikasi melalui toa masjid, bahwasanya akan terjadi hujan dan banjir agar masyarakat dapat mengantisipasi apabila terjadi hujan deras. Biasanya komunikasi kita melalui kepala desa, satgas, lalu kemudian kepala desa menyampaikan kepada tokoh agama. Kalau Kecamatan Hamparan Perak hampir rata rata penduduknya muslim, ya nanti bakal disampaikan melalui

toa masjid, kemudian barulah kepala desa bergerak ditempat keramaian. Seperti itulah bentuk komunikasi kita. Kalau bentuk komunikasi dengan alat canggih belum ada, contohnya, ada sekarang alat untuk mitigasi banjir itu. Apalagi terjadi hujan deras di hulu terjadilah hujan deras, ada alat komunikasinya, jadi begitu air naik, dia udah sampai kebawah nanti ke hilir, sudah ada tanda bahwa air itu bakal kemari, bakal ada banjir disini itu lah belum ada alat kita sampai sekarang. Memang belum ada anggarkan itu, cuman hari itu kominfo yang sempat menganggarkan itu. Makannya kalau untuk komunikasi sampai saat ini kita yang paling melalui surat, surat kita berikan kepala kepala desa, kepada Kecamatan baru nanti kepala desa menyampaikan melalui masjid, itu jenis komunikasi masih manual seperti itu, baru nanti pada tempat keramaian”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat diketahui bahwa keterbatasan komunikasi dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Informasi mengenai potensi banjir umumnya disampaikan oleh BPBD melalui pemerintah Kecamatan dan Kepala Desa, kemudian diteruskan kepada masyarakat melalui tokoh agama atau menggunakan pengeras suara di masjid. Hal ini menunjukkan bahwa menyampaikan informasi kepada masyarakat masih dilakukan secara manual dan belum didukung oleh teknologi komunikasi yang lebih modern. Selain itu juga, keterbatasan alat peringatan dini serta belum tersedianya sistem komunikasi yang lebih canggih juga menjadi faktor yang mempengaruhi penyebaran informasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya banjir di Kecamatan Hampan Perak.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam menunjukkan empati terhadap kondisi dan pengalaman masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Hampan Perak. Sikap empati ini dari pemerintah sangat penting dalam penanganan bencana, karena masyarakat yang terdampak tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga perhatian serta bantuan dari pemerintah. Melalui tindakan seperti ini pemberian bantuan, kehadiran petugas di lokasi bencana, serta dukungan kepada masyarakat yang terdampak, diharapkan masyarakat dapat merasakan bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap kondisi yang mereka alami. Oleh karena itu, Ketika penelitian bertanya bagaimana upaya pemerintah dalam menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Hampan Perak, informasi dari BPBD yaitu narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Upaya kita empati kepada masyarakat, pertama kita sudah tau ini bakal ada banjir. Contoh, sebegitu banjir rob hari itu, kita sudah pengalaman dari banjir yang sebelumnya. Begitu banjir, karena itu banjir rob. Kita sudah menunjukkan empati kita, pertama kita sudah mengirimkan satgas ke lokasi contohnya di Hampan Perak, sudah kita hasilkan satgas disitu. Kita bertugas untuk mengantisipasi banjir sudah kita tugaskan kesana mereka. Jenis empati kita nah ini inikan mitigasi sebelum terjadinya banjir, jadi sebelum terjadinya banjir kita kirimkan dulu kesana satgas kita baru setelah itu kalau ini memang terjadinya banjir kita masih mengirimkan peralatan contoh seperti perahu ban, tenda-tenda. Setelah pengalaman kita, banjir ini ke banjir rob, barulah kita udah berpengalaman dari situ, jadi jenis ap akita untuk menunjukkan empati kita, kita kirimkan kesana peralatan terjadinya banjir. Sementara di banjir rob kita kirim peralatan seperti tenda-tenda, apa yang dibutuhkan masyarakat seperti sembako, dapur umum, dan kita sudah membentuk pos disana posko. Posko ini tempatnya di lokasi banjir-banjir

itu bakal disini kita kirim satgas kita di luar pengalaman dari banjir sebelumnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat diketahui bahwa pemerintah menunjukkan empati kepada masyarakat yang terdampak banjir dengan melakukan berbagai upaya sebelum dan setelah bencana terjadi. Sebelum banjir terjadi BPBD terlebih dahulu mengirimkan satuan tugas (satgas) ke lokasi yang berpotensi terdampak banjir sebagai langkah antisipasi. Selain itu juga, Ketika banjir benar-benar terjadi, pemerintah juga memberikan bantuan berupa peralatan dan kebutuhan darurat bagi masyarakat, seperti perahu karet, tenda pengungsian, sembako, serta mendirikan dapur umum dan posko bantuan di lokasi banjir. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir, sehingga dapat memperoleh bantuan serta dukungan yang diperlukan selama menghadapi banjir di Kecamatan Hampan Perak.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana sikap empati pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat terhadap pesan mitigasi bencana di Kecamatan Hampan Perak. Sikap Empati dari pemerintah sangat penting dalam komunikasi kebencanaan karena dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Ketika masyarakat merasa diperhatikan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, maka pesan-pesan mitigasi bencana yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat. Oleh karena itu, Ketika peneliti menanyakan bagaimana sikap empati pemerintah mempengaruhi masyarakat terhadap pesan mitigasi bencana di Kecamatan Hampan Perak, narasumber dari BPBD narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Sikap empati pemerintah mempengaruhi masyarakat. Sebenarnya kami pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agak sulit. Karena masyarakat belum sadar bahaya banjir ini, cuman kita ada mitigasi sebelum banjir susur sungai, susurnya itukan sebelum terjadinya bencana, mana sungai-sungai yang biasa terjadinya banjir, ada program kita susur sungai, kegiatan kita jadi mungkin Hamparan Perak itu belum, karena ini sesuai dengan permintaan dari pemerintah setempat, pemerintah desa, kecamatan, kalau memang ada orang ini mint akita susur, kita susur. Kita yang sudah laksanakan ada di batang kuis, di deli tua, dipakam yang sudah kita laksanakan. Kita susur sungai itu untuk menanggulangi banjir, tapi Hampaaran Perak belum, karena masyarakat ini apatis sebenarnya masyarakat ini perlu untuk misi banjir, gotong royong itu tidak ada lagi sikap gotong royong, gotong royong di masyarakat sudah berkurang jadi seperti untuk menanggulangi banjir ini dari sungai, mereka tidak ada untuk melakukan pembersihan sungai tidak ada. Jadi kita pun melakukan susurnya gak ikut berpartisipasi, paling 3 hari kesitu nanti paling mereka 1 hari 2 hari tidak kesitu lagi. Jadi mereka hanya mengharapkan pemerintah daerah, sebenarnya untuk mitigasi banjir ini, termasuk bukan gtermasuk tugas pemerintah daerah saja, tapi juga termasuk tugas masyarakat mereka ikut berpartisipasi, cuman kita untuk menyadarkan masyarakat ini yang susah, bagaimana bahaya banjir ini nanti. Makannya sebelum banjir kita lakukan mitigasi ini, tapi itulah masyarakat ini susah kita mengajaknya untuk menanggulangi bencana banjir ini”.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber 1 dapat disimpulkan bahwa sikap empati pemerintah dalam mitigasi bencana belum sepenuhnya mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap bahaya banjir. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mitigasi, seperti kegiatan susur sungai untuk mengidentifikasi lokasi lokal yang berpotensi menyebabkan banjir serta sebagai langkah pencegahan sebelum bencana banjir terjadi. Namun, dalam

pelaksanaan partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, karena sebagian masyarakat masih bersikap kurang peduli terhadap upaya pencegahan banjir.

Hal ini terlihat dari berkurangnya kegiatan gotong royong masyarakat dalam membersihkan sungai maupun lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun pemerintah telah berupaya menunjukkan empati dan melakukan berbagai program mitigasi, kesadaran serta keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pesan mitigasi bencana dapat diterima dan dijalankan dengan lebih baik di Kecamatan Hampan Perak. Kondisi ini menunjukkan bahwa empati yang ditunjukkan pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak. Dukungan pemerintah sangat penting dalam upaya mitigasi bencana, karena melalui berbagai program, sosialisasi, serta bantuan yang diberikan. Masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum maupun saat bencana terjadi. Selain itu dukungan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Ketika peneliti menanyakan bagaimana bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, narasumber dari BPBD yaitu narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau dukungan pemerintah kepada masyarakat sudah banyak yang kita lakukan, contohnya sebelum terjadinya banjir. Sikap mendukung pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita berikan edukasi kepada masyarakat dan jalur jalur seperti evakuasi, tapi jalur evakuasi itu belum ada kita buat, tapi kita sudah dukung kepada masyarakat biar masyarakat aman, kita kasih edukasi kita bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar mereka merasa aman. itulah di pemerintah itu kita melakukan sosialisasi kpd masyarakat bahwa sebelum banjir ini harus kita lakukan. ya sosialisasi kepada masyarakat. seharusnya di desa sudah di bentuk DESTANA namanya (desa tanggung bencana). tapi sampai sekarang belum bisa dibentuk itu DESTANA itu. Seharusnya udah ada setiap desa ada DESTANA nya Desa Tanggung Bencana jadi sebelum pemerintah, ya mereka dulu yang melakukan disana, desa itu dulu yang mau kita bentuk ini. nanti kan kita bentuk kita mati tu bagaimana mengapai kesiapsiagaan bencana itu. bagaimana mitugasinya bagaimana menanggulangi bencana itu harusnya udah dibentuk itu DESTANA itu. sampai sekarang belum, memang udah ada bentuk DESTANA tapi mungkin Hampan Perak belum itu, belum membentuk destana. padahal mereka udah tiap tahun kan? kita harapkan 2-3 orang aja dulu udah ada setiap desa itu anggotanya. ha itu. jadi nanti waktu ada pemerintah ya itu kita melakukan sosialisasi, melakukan susur sungai, didukung pemerintah kan? kalau peralatan sampai sekarang belum, tapi kita sekarang sudah membentuk pos. Pos satgas apa bencana di 6 wilayah 8 tapi 6 yang sudah kita apakan. untuk di labuhan deli, akan disatukan di Hampan Perak. ha itulah apa kita untuk dukung pemerintah. kita sudah bentuk post termasuk pos damkar untuk bencana non alam. Itu kita bentuk itulah salah satu dukungan pemerintah membentuk pos agar apa itu lebih cepat lagi dan mereka nanti yang mensosialisasikan ke desa desa. ke desa, ke sekolah bagaimana mengantisipasi adanya mitigasi bencana ini nanti mereka itu. sosialisasi ke sekolah sekolah, ke perusahaan perusahaan yang ada, ke warga masyarakat itulah pos yang tiap hari. nah itulah salah satu dukungan pemerintah daerah. ini baru tahun ini nih, baru bulan Februari

ini nih kita post disana. itulah salah satu termasuk nanti halat. halat nanti yang mau kita maunya disitu kita bentuk pos dan alat kita apakan ke sana. nah pelan pelan lah cuman untuk sementara ini hanya peralatan seperti cangkul lah apalah ha nanti kita lihat dulu tempat kalau ada tempat nanti baru nanti perahu apa itu. ha itulah salah satu dukungan kita ya kita bentuk pos di ada beberapa wilayah. baru sikap mendukung pemerintah dapat membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap bencana Hampan Perak. dan sikap mendukung pemerintah serta membangun kepercayaan. ya kalo dukungan pemerintah untuk dapat masyarakat apa merasa aman”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat diketahui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai bentuk dukungan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya bencana banjir. Selain itu juga, pemerintah berencana membentuk desa Tangguh Bencana (DESTANA) agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi potensi banjir di wilayahnya. Pemerintah juga membentuk pos satuan tugas (satgas) di beberapa wilayah sebagai pusat koordinasi penanganan bencana serta sebagai sarana untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir serta mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Hampan Perak.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana sikap mendukung pemerintah dapat membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi kebencanaan di Kecamatan Hampan Perak. Sikap mendukung dari pemerintah sangat penting dalam komunikasi kebencanaan karena dapat meminimalkan dampak bencana. Oleh karena itu, Ketika peneliti bertanya bagaimana sikap mendukung pemerintah dapat membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi kebencanaan di Kecamatan Hampan Perak, narasumber dari BPBD narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Sikap mendukung pemerintah kalau mau aman, ya itulah. Kita berikan edukasi kepada masyarakat dan jalur jalur evakuasi. Tapi ini, jalur evakuasi sampai sekarang belum. Entah sudah atau belum jalur evakuasi itu. Bagaimana kalau terjadinya banjir. Tapi sampai saat ini, jalur itu belum kita buat. Tapi kita sudah mendukung masyarakat biar ada rasa aman masyarakat, ya kita beri edukasi. Kita beri bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar mereka merasa aman agar tahu cara menanggulangi banjir ini. Pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat itu udah jadi dukungan dari pemerintah. Karena kita dapat info ini dari BMKG, dan seperti ini lah kadang-kadang kata BMKG bakal terjadi kekeringan. Nah itu, kita baru zoom sama BNPB baru nanti kita lanjutin. Nah seperti itulah agar masyarakat aman kalau semisal terjadinya banjir”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat disimpulkan bahwa, sikap mendukung dalam membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat dilakukan melalui memberikan edukasi dan sosialisasi terkait mitigasi bencana banjir. pemerintah juga memperoleh informasi dari BMKG dan BNPB mengenai kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana, kemudian

informasi tersebut diteruskan kepada pemerintah desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Meskipun jalur evakuasi secara khusus belum sepenuhnya tersedia, pemerintah tetap berupaya memberikan dukungan melalui penyampai informasi dan sosialisasi, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam menghadapi potensi banjir di Kecamatan Hampan Perak.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana sikap pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir, khususnya Ketika menghadapi masyarakat yang kurang reponsif atau bersikap skeptis terhadap informasi kebencanaan yang disampaikan pemerintah. Narasumber dari BPBD yaitu narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau kita dari pemerintah termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, kita tidak ada bosan-bosannya menginformasikan kepada masyarakat untuk bagaimana mencegah banjir itu. Tapi kembali lagi kepada masyarakatnya yang tidak merespon. Kita sudah sampaikan bahwa mereka menganggap banjir itu sebagai hal sepele. Kalau kita tetap terus menyampaikan kepada masyarakat. Tapi terus berulang hal yang seperti itu lagi. Berputar terus di situ-situ aja. Tapi kalau dari pemerintah ini tidak ada bosan-bosannya menyapaikan informasi itu kepada masyarakat. Maka begitu kita dapat informasi BMKG, kita langsung informasikan dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, hingga ke satgas bencana. Satgas bencana ini kan dibentuk beberapa kedinasan. Contohnya dinas Kesehatan, dinas sosial, dan sebagainya. Bagaimana sikap kita? Ya tentunya kita tidak bosan-bosan untuk menginformasikan kepada masyarakat. Walaupun masyarakatnya tidak merespon dengan baik, tetap kita informasikan kepada masyarakat. Tapi ya tetap dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, lalu ke desa dan tetap menginformasikan kepada masyarakat walaupun masyarakat tidak responsive, skeptis, tidak menerima tapi tetap kita informasikan kepada masyarakat. Karena itu tugas pemerintah. Serta kami mengajak,

bagaimana cara mengantisipasi banjir ini, itu kan fungsi mitigasi itu. Kita tidak bosan-bosan, tetap kita ayokan. Tapi itu, masyarakat ini seperti yang saya bilang tadi, kita melakukan mitigasi di mana, kita usut di mana penyebab banjir itu. Karena mereka tidak mau ikut dan tidak mau terlibat. Kalau tenaganya di kita aja, kuranglah dan tidak mungkin kita ke Hamparan Perak aja hanya satu kali seminggu. Tenaga disini cuman berapa orang. Apalagi sekarang pos itu udah dijaga masing-masing. Jadi kalau masyarakat setempat ikut, jadi lebih cepat ditangani. Jadi intinya, pemerintah daerah, kecamatan, tidak ada bosan dan capek untuk menghadapi masyarakat, untuk tetap mengajak masyarakat ini untuk bagaimana cara menanggulangi banjir ini. Tetapi sudah kita informasikan kepada masyarakat ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat disimpulkan bahwa pemerintah tetap berupaya konsisten dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana kepada masyarakat meskipun sebagian masyarakat masih kurang reponsif atau bersikap skeptis terhadap informasi yang diberikan. Pemerintah daerah Bersama pemerintah kecamatan dan desa terus menyapaikan informasi yang diperoleh dari BMKG mengenai potensi terjadinya banjir kepada masyarakat. Informasi tersebut juga disampaikan melalui satuan tugas bencana yang melibatkan berbagai instansi seperti dinas Kesehatan dan dinas sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya efektivitas komunikasi mitigasi bencana.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana sikap positif pemerintah terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi banjir di Kecamatan Hamaparan Perak. Sikap positif pemerintah sangat penting dalam komunikasi mitigasi bencana karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan serta lebih siap menghadapi potensi banjir. Oleh karena

itu peneliti menanyakan bagaimana sikap positif pemerintah terhadap perubahan sikap, dan perilaku masyarakat dalam menghadapi banjir di Kecamatan Hampan Perak, narasumber dari BPBD yaitu narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau kita tetap bersikap positif karena perubahan sikap masyarakat itu biasa. Karena mungkin masyarakat sekarang lebih sibuk untuk mencari kebutuhan umum, seperti pekerjaan. Tapi kalau untuk masalah banjir ini, sikap positif kita ya tetap menyampaikan informasi kepada masyarakat. Walaupun sikap dan perilaku masyarakat berubah dalam menghadapi masalah banjir, kita dari pemerintah daerah, BPBD, tetap melakukan sosialisasi, tetap melakukan mitigasi, bagaimana bahaya banjir ini, itu tetap kita lakukan. Kita tetap merespon positif walau respon di masyarakat ini kurang baik. Kita juga sebenarnya sudah jauh dari kebiasaan nenek moyang kita dulu seperti gotong royong. Karena kita sekarang lebih fokus untuk mengembangkan diri sendiri gitu. Tidak seperti sikap nenek moyang kita dulu bagaimana gotong royong ini, termasuk juga untuk menanggulangi banjir ini. Kadang seperti itu sikap masyarakat ini, tidak peduli. Padahal kita sudah sosialisasi bahwa mendirikan bangunan dekat dengan sungai, risiko bahayanya lebih tinggi. Lebih rentan terkena banjir. Kalau ada banjir, rumah disitu pasti jadi sasaran utama. Padahal hal itu sudah kita sampaikan dan mungkin dari pemerintah daerah tentang pembangunan rumah, ada mengatur tentang tidak boleh membangun rumah dengan jarak sekian meter dari tepi sungai. Tapi masyarakat tidak mengindahkan itu. Intinya sikap masyarakat ini sudah berubah dari sikap nenek moyang kita yang mau gotong royong dan untuk menanggulangi banjir itu. Kalau kita dari pemerintah tetap melakukan hal positif seperti mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat. Karena biaya perbaikan pasca banjir kan lumayan. Belum lagi bentuk dapur umum, belum lagi memberi sembako. Tapi memang daerah Pampan Perak ini, banjir ini kan dari hulu ke hilir, Hampan Perak merima akhir. Kita ada 4 kecamatan yang dekat dengan laut yaitu Pantai

Labu, Percut Sei Tuan, Hamparan Perak, dan Labuhan Deli. Setiap banjir pasti kecamatan ini yang belakangan surutnya, pasti lebih dari seminggu. Seminggu waktu paling cepatnya. Karena nerima banjirnya belakangan. Karena didorong oleh air laut. Apalagi kemarin yang terjadi tahun 2025, itukan banjir rob. Banjir rob itu malah naik ke pemukiman lalu mendorong tidak tidak berdampak maka air itu terus tertahan. Makanya seperti Pantai Labu, Hamparan Perak kan lebih dari seminggu. Itu lah yang paling lama. Kenapa? Karena disini hilir dan paling bawah. Waktu terjadi rob, padahal adanya klep penahan banjir rob (backwater valvel check valve got), tapi saat klepnya dibuka, malah air laut yang naik ke pemukiman, maka klep ini ditutup dulu, jadi airnya bertahan dulu disitu sampai air rob itu surut. Saat pagi surut, dibukalah klep itu. Saat air laut naik, klepnya ditutup lagi. Yang dialami Hamparan Perak ini seperti itu. 4 kecamatan ini hampir sama tipenya. Di Hamparan Perak ini ada 4 desa dan desa itulah yang menerima banjir rob setiap tahunnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat disimpulkan bawah pemerintah tetap menunjukkan sikap positif dalam menghadapi perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap bencana banjir. meskipun sebagian masyarakat saat ini kurang aktif dalam kegiatan gotong royong dan kurang memperhatikan imbauan pemerintah untuk pencegahan banjir, pemerintah tetap berupaya memberikan sosialisasi dan informasi mengenai bahaya banjir kepada masyarakat. Pemerintah juga terus meningkat masyarakat mengenai risiko membangun permukiman di dekat sungai yang dapat meningkatkan potensi terjadinya banjir.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana pemerintah memastikan adanya kesetaraan dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak. Kesetaraan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Oleh karena

itu Ketika peneliti menanyakan bagaimana pemerintah memastikan adanya kesetaraan dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Hampan Perak, narasumber dari narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pemerintah ini tidak ada mempetakan atau tidak membedakan masyarakat. Kita tetap setarakan baik itu gender atau agama, tidak ada. Kita dari pemerintah tetap menyetarakan semua masyarakat, tentang banjir, kita tetap informasikan kepada mereka. Tidak ada kita bedakan masyarakat ini. Semua masyarakat kita informasikan, sebelum hal ini (banjir) terjadi, masyarakat kan harus terlibat semua. Tidak harus dia yang islam, yang Kristen, kan seperti itu. Pokoknya kita semua setara”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat diketahui bahwa, pemerintah berupaya memastikan adanya kesetaraan dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Hampan Perak. Pemerintah tidak membedakan masyarakat berdasarkan latar belakang agama, gender, maupun status sosial. Dalam memberikan informasi mengenai potensi banjir semua pihak dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum terjadi bencana, dengan adanya penyampaian informasi yang setara, diharapkan seluruh masyarakat dapat terlibat secara Bersama-sama dalam upaya dalam mitigasi bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir di Kecamatan Hampan Perak.

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana sikap kesetaraan dalam komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak. Sikap kesetaraan dalam komunikasi sangat penting, karena dapat membangun

hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan dilibatkan dalam proses penyampaian informasi kebencanaan, masyarakat akan lebih terbuka dan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana. Oleh karena itu, Ketika peneliti menanyakan bagaimana sikap kesetaraan dalam komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak, narasumber dari BPBD yaitu narasumber 1 memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dalam hal komunikasi juga tidak ada kita beda-bedakan. Belakangan ini partisipasi masyarakat tentang bahaya banjir itu sangat kurang. Kalau kita dari pemerintah, kita sudah siap siaga bahkan sebelum terjadi bencana bahkan sebelum terjadi bencana, kami sudah berangkat ke lokasi untuk membentuk posko. Dalam hal ini untuk banjir ya. Kalau semisal kita dari pemerintah daerah menerima info dari BMKG, contoh pengalaman banjir yang terjadi pada bulan November 2025. Kita mendapat peringatan dari BMKG, sungguh. Kita disini hanya menganggap, “ah belum adanya itukan” karena banjirnya sudah kita anggap biasa. Ternyata tanggal 26 November kita sudah dapat info dari pemerintah daerah dan desa, bahwa Hampan Perak Air rob sudah naik. Jadi satgas ini kita arahkan buat mastiin kejadiannya benar atau tidak. Ternyata benar dan diinformasikan kepada pemerintah desa. Responnya “biasa itu pak, jangan goyang kali. Kalau air naik pak, sudah biasa itu. Gak apa-apa itu. Besok surutnya itu”. Ternyata air sudah di jalan. Ternyata hujan malam itu, disini tidak terlalu deras tapi di hulu sangat deras. Ternyata dari kecamatan disana seperti Bener Meriah, sudah menginformasikan bahwa disana sudah banjir dan air sudah naik dan bakal banjir kemari. Arah menuju Kota Medan dan Deli Serdang. Ternyata besoknya, tanggal 26 November 2025, airnya sudah naik tapi bukan air laut lagi, tapi air dari banjir disana. Setelah itu kita bingung. Pada tanggal 26

November 2025, bukan hanya Hampan Perak saja yang banjir tapi 16-17 kecamatan di Deli Serdang terdampak. Sementara peralatan kita tidak cukup. Makanya dibutuhkan seperti perahu, banyak kecamatan yang minta jadi bingung kita. Akhirnya tidak bisa terpenuhi semua. Syukur ada beberapa daerahnya yang hanya lewat saja dan ada juga yang sampai sehari-hari. Iya. Karena campur banjir rob itu. Lalu setelah itu, ada berita tentang bakal terjadinya banjir rob dan naik hingga 2 Meter lebih. Kalau tingginya segitu, kan sudah hampir setinggi rumah. Jadi berdasarkan pengalaman itulah untuk mencegah dampak banjir terhadap masyarakat. Kita kirim mereka ke pos dan beberapa pos di 4 kecamatan ini. Tapi Hampan Perak termasuk. Kita buat pos disana termasuk pos pengungsi sudah kita siapkan. Sebelum terjadinya banjir rob ini, kita sudah mencari tempat yang aman dan sudah kita dirikan dapur umum dan kita sudah kerja sama dengan dinas sosial, sampai disitu sudah kita siapkan. Sudah duluan kita siapkan logistic logistic dan informasi banjir itu sudah kita sebar dan sudah dipersiapkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Syukur kalau hal itu tidak terjadi. Jadi ternyata naik tapi tidak terlalu tinggi. Siklon tropis ini ternyata adanya perubahan arah angin. Jadi dari BMKG menyatakan bahwa Sumut terdampak tapi setelah itu, berubah lagi ke daerah lain. Jadi intinya, kita menginformasikan kepada masyarakat bakal akan terjadi ini dan itu sebelum terjadi. Tapi kalau dari BPBD, ada kegiatan bernama susur sungai, kegiatan mitigasi, mencegah terjadinya banjir. Kita susur sungai, lalu kita ada bentuk pos lagi. Karena susur sungai ini adalah tindakan untuk mencegah banjir seperti melihat sungai mana yang terjadi penyempitan atau ada tanggul yang bermasalah. Karena kebanyakan kejadian akibat dari tanggul yang tidak mampu menahan debit air sehingga bisa terjadinya banjir bandang. Hampan Perak juga hampir terkena karena tanggul yang hampir jebol. Di Hampan Perak terdapat beberapa lokasi yang dijadikan tanggul. Lalu adanya penyempitan aliran sungai. Karena itu semua sudah didata, termasuk Hampan Perak. Kalau menurut kami, masyarakat disini sudah terbiasa menghadapi banjir. Jadi harapan kami dari

pemerintah, maunya masyarakat ikut berpartisipasi, peduli terhadap informasi yang kita sampaikan, sosialisasi yang kami lakukan. Kami harap, perpanjangan kami, yaitu pemerintah desa untuk mejamah masyarakat. Kita sudah sering melakukannya, makanya kami membentuk pos disana. Itulah salah satu jenis antisipasi dan mitigasi kita tentang bagaimana mencegah terjadinya banjir. Makanya kami bentuk pos agar informasi bisa lebih cepat tersalurkan. Itulah salah satu fungsi pos juga. Kalau dulu kan mereka disini, sudah kejadian baru berangkat. Kalau sekarang mereka sudah ada disana. Kita hanya menerima informasi dari desa. Desa kan ada namanya Destana. Ada juga bentuk seperti relawan makanya kita bentuk pos. Jadi mereka lah yang berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah desa. Sebenarnya Labuhan Deli memiliki pos sendiri, namun karna berdekatan dan personil yang kurang, makanya disatukan dengan Hampan Perak. Karena Hampan Perak setiap tahun terkena dampaknya. Karena kita nampung trakhir sebelum menuju ke laut. Jadi hal seperti itu tidak bisa dielak. Karena ada beberapa sungai yang akhirnya ketemu di Hampan Perak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dapat diketahui bahwa sikap kesetaraan dalam komunikasi pemerintah dilakukan dengan tidak membedakan masyarakat dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana, pemerintah berusaha memebrikan informasi yang sama kepada seluruh masyarakat mengenai potensi banjir serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi bencana. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya mitigasi seperti membentuk posko bencana, melakukan kegiatan susur sungai untuk memantau kondisi aliran sungai, serta menyiapkan logistic dan tempat pengungsian sebelum banjir terjadi. Namun, partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana masih tergolong rendah karena sebagian masyrakat menganggap banjir sebagian kejadian yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya

mendorong masyarakat agar lebih peduli dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi bencana, sehingga kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir di Kecamatan Hampan Perak dapat meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti, dapat diketahui bahwa komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPBD di Kecamatan Hampan Perak telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal penyampaian informasi melalui koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan penggunaan media komunikasi yang tersedia.

Namun, komunikasi mitigasi bencana belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan alat komunikasi modern penyampaian informasi yang masih bersifat manual, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu diperlukan upaya meningkatkan strategi komunikasi, baik dari segi metode, media, maupun pendekatan kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara optimal.

4.4.2 Hasil Wawancara Narasumber 2

Ketika peneliti menanyakan bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir kepada masyarakat di Kecamatan Hampan Perak, Kepala Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa berupaya memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait potensi terjadinya banjir. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan desa, sosialisasi kepada masyarakat, serta melalui

perangkat desa yang membantu menyampaikan kembali informasi kepada warga di lingkungannya masing-masing. Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah maupun BPBD apabila terdapat potensi banjir agar masyarakat dapat lebih waspada dan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi.

Narasumber 2 menjawab:

“Di Kecamatan Hampan Perak ini ada 20 desa. 20 desa, kita lah termasuk desa Gelombang Kebun di dalam 20 desa itu. Kalau malah imitigasi, kalau untuk masalah banjir, Alhamdulillah kita hanya dusun 6 Parangrejo aja yang kita antisipasi. Dusun 6 Parangrejo, Al-manar, yang di mana kemarin sudah sebelum tahun 2025, minus 3 hari sebelum lebaran, itu sudah datang orang bera Sudah, setelah itu saya minta lagi X-loader. Alat berat yang bentuk kecil Yang langsung ke warga. Itu tadi. Saya sudah berulang kali, saya bilang sama kapal dusun. Setelah itu di Korek, setelah itu di genasinya di apa, ya minimal sebulan sekali harus ada gotok royong lah. Jadi di sini, Sekali lagi, saya mempunyai perpanjangan tangan Kepala Dusun itu kan untuk bagaimana masyarakat itu merasa nyaman, aman jika terjadi musibah, banjir, musibah kebakaran. Jadi kita mempunyai perpanjangan tangan itulah Kepala Dusun. Kalau Kepala Dusunnya tidak proaktif, Kepala dusunnya tidak bisa menyelesaikan apapun yang ada di dalam permasalahan masyarakat. Bagaimana masyarakatnya bisa maju? Visi-misi saya sebagai Kepala Desa ya, ikut dengan Bapak Bupati Deserdang dan Bapak Keil Bupati Deserdang, bagaimana caranya masyarakat ini aman, nyaman. Tidak takut kalau misalnya ada hujan banjir, hujan deras tidak takut ada banjir. Yang kedua, alhamdulillah Kelumpang Kebun ini satu desa yang di mana kita sudah punya saluran. Tapi tinggal cara gimana kita melihara saluran airnya. Kita sudah berupaya, sampai pun kita akhirnya keliling, Kan gak perlu kasih tau orang kita keliling malam. Cuman kita kan tau aliran ini kemana airnya. Jadi sekali lagi yang pertama, yang paling apa itu dusun 6

Karamerjo. Dari situ dia muncul terus ke dusun 13. Jadi sini memang harus kepala dusunnya ikut beserta lah. Kalau di dalam wilayah, contohnya di dusun lima lagasari, kalau kepala dusunnya tidak proaktif, apa yang kalian dapat? Kalau kami ini di pemberitaan desa ini, ini berdasarkan dari kabupaten, begitu diberitakan, kami tetap memberitahakan kepada kepala dusun. Contoh, masalah bencana lama, kita punya anggaran. Dan itu anggaran nggak terbatas kalau Pak Bupati dan Wakil Bupati mengizinkan. Untuk khusus sosial lah. Dari Serdang, Desa Matanan Perak. Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di dalam membantu warga hampan pera, terkhusus Desa Kelumpang Sampai dengan sekarang kita nomor satu lah. Dari mulai jalan, jembatan, arah ke seberang. Itu termasuk penanggulangan bahaya banjir. Jadi tidak ada alasan kita. Maka saya katakan kepada kepala dusun, berpanjangan tangan saya, sesenangkan warga. Dalam kategori, kalau dia tidak aktif gimana? Jadi, saya sebagai basic politician Klumpang Kebun, apalagi dari mahasiswa, yang sekarang mahasiswa secara berpikirnya pun, bantu saya. Iya. Jadi, to proxy masing-masing perangkat ini, ketahuan. Kalau ini berjalan deh, enggak payah. Alhamdulillah sekarang kita, Desa Kelompok Kabun ini, Kecamatan Apan-Apan sudah berjalan. Adik sebagai mahasiswa bisa melihat macam mana sekarang. Ketimbang dahulu ya. Sekarang kita tidak ada batas, kenapa? Kalau untuk, Kesejahteraan masyarakat, Kejambatan Ampampera, 20 desa yang ada, Pak Bupati dan Wakil Bupati sudah siap”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Hampan Perak telah berupaya menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir kepada masyarakat secara terbuka melalui berbagai cara, seperti menyampaikan informasi dari pemerintah daerah kepada kepala dusun, mengajak masyarakat melakukan gotong royong secara rutin, serta melakukan pemantauan terhadap kondisi saluran air di lingkungan desa. Kepala desa juga menekankan pentingnya peran kepala dusun sebagai perpanjangan tangan

pemerintah desa dalam menyampaikan informasi dan mengoordinasikan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman, nyaman, serta lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana keterbatasan komunikasi dalam penyampaian informasi mitigasi bencana kepada masyarakat, Kepala Desa menjelaskan bahwa dalam proses penyampaian informasi terkadang masih terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta tidak semua warga dapat menerima informasi secara bersamaan. Hal ini membuat pemerintah desa harus menyampaikan informasi secara bertahap melalui kepala dusun sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa agar pesan yang disampaikan dapat diteruskan kepada masyarakat di setiap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan melakukan koordinasi yang lebih aktif dengan perangkat desa serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan pertemuan warga, sehingga informasi terkait mitigasi bencana banjir dapat tetap tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Ya itu tadi yang saya bilang. Kita desa kelompok-kelompok tidak ada membatasi selagi kepala dusunnya proaktif. Jadi, apalagi saya, notabnya penjabat. Yang langsung Bapak Bupati berikan SK kepada saya. Saya membandingkan betul yang di mana kepala dusunnya tidak proaktif. Sebagai perpanjangan tangan saya, yang mempunyai nilai plus, yang mempunyai hati inuran, janganlah ada masyarakatnya. Kalau sudah masyarakatnya hanya makan sekali dalam satu hari, itulah banjir bisa

datang. Itu namanya karamah Allah. Karma yang nggak bisa kita cegah. Itu aja”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan komunikasi dalam penyampaian informasi mitigasi bencana banjir masih dapat terjadi, terutama apabila perangkat desa seperti kepala dusun kurang aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, kepala dusun memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa untuk memastikan informasi dapat diterima oleh masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, keaktifan dan kepedulian perangkat desa sangat diperlukan agar penyampaian informasi mengenai potensi bencana banjir dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana upaya pemerintah dalam menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir, Kepala Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa berusaha hadir secara langsung di tengah masyarakat ketika terjadi banjir maupun ketika masyarakat mengalami kesulitan akibat bencana tersebut. Pemerintah desa berupaya memahami kondisi yang dialami masyarakat dengan memberikan perhatian, bantuan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu warga yang terdampak. Selain itu, pemerintah desa juga berusaha mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat agar penanganan yang dilakukan dapat sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh warga. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah desa berharap masyarakat dapat merasakan adanya kepedulian dan dukungan dari pemerintah sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap terjalin dengan baik.

“Khususnya Desa Kelompok Kebun. Desa Kelompok Kebun yang dusun yang selalu Banjir tuh disenam, karena rejo. Jangankan empati Material semua sudah kita upayakan. Sampai alat berat sudah kita turunkan di Sungai Wita. Itu sudah bersih kemarin. Axe loader, alat kecil dari bank, itu sudah kita upayakan juga kemarin. Ya tadi, perpanjangan Kepala Dusun, kalau Kepala Dusunnya tidak ada empatinya, tidak ada gotong royong dalam sebulan sekali. Ya pastilah, rumput itulah yang buat kita banjir, rumput itulah yang buat kita tergenap. Jadi, disini saya sudah perintahkan, Saya sudah lelah memberitahkan, kalau tidak kepala dusunnya proaktif, jangan harap masyarakatnya dapat dengannya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berupaya menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak banjir dengan memberikan perhatian secara langsung serta melakukan berbagai upaya penanganan, seperti menurunkan alat berat untuk membersihkan aliran sungai dan memperbaiki kondisi lingkungan yang berpotensi menyebabkan banjir. Selain itu, pemerintah desa juga menekankan pentingnya peran kepala dusun dalam mengajak masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan saluran air secara rutin. Melalui upaya tersebut, pemerintah desa berusaha menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus mendorong kerja sama antara pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam mengurangi risiko terjadinya banjir.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana sikap empati pemerintah memengaruhi masyarakat terhadap pesan mitigasi bencana di Kecamatan Hampan Perak, Kepala Desa menjelaskan bahwa sikap empati pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Ketika pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang

terdampak banjir, masyarakat cenderung lebih mudah menerima dan memperhatikan pesan-pesan mitigasi bencana yang diberikan. Selain itu, pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat juga membuat hubungan antara pemerintah dan warga menjadi lebih dekat sehingga masyarakat lebih terbuka dalam menerima arahan maupun informasi yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan banjir. Dengan adanya sikap empati dari pemerintah, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya kesiapsiagaan serta lebih aktif dalam menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana banjir.

“Kalau di Kecamatan saya tidak apa-apa ya, karena 20 desa itu untuk Pak Camerlain menjawab. Tapi kalau untuk di Desa Gulab Bangkabur, kita sudah berupaya penuh. Sampai dengan sekarang kita sudah minta alat berat juga. Untuk menyisir sungai-sungai yang kotor. Pembersihan sungai-sungai. Yang di mana? Antisipasi. Untuk amannya masyarakat nanti melihat tidak akan lagi ada banjir di desa kelompok gebu. Lanjut pak, bagaimana bentuk dukungan pemerintah pada masyarakat dalam meningkatkan kesaksangan menghadapi bencana banjir, pak? Ya, alhamdulillah. 21 dusun ini sesuai yang ada, anggaran yang ada, kita keluarkan jika nanti ada banjir. Kalau untuk 2025 sudah habis, yang termahal semalam yang agak lumayan, agak lumayan ada beberapa dusun yang terendam. Tapi kita dengan kebersamaan, semangat bersama, kita jalin bersama dengan BPD, LPM, BABIN Gatimas, BABINSA, kita bersatu, akhirnya banjir bisa kita hadapi, khusus untuk desa kelompok-kelompok menghadapi sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap empati pemerintah memiliki pengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap pesan mitigasi bencana. Pemerintah desa berupaya menunjukkan kepedulian dengan melakukan berbagai tindakan nyata, seperti membersihkan sungai

menggunakan alat berat untuk mengantisipasi terjadinya banjir serta menyiapkan anggaran desa apabila terjadi bencana. Selain itu, pemerintah desa juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BPD, LPM, Babinkamtibmas, dan Babinsa dalam menghadapi banjir yang terjadi di beberapa dusun. Melalui kerja sama dan kepedulian tersebut, masyarakat diharapkan dapat merasa lebih aman serta lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir di wilayah desa.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana sikap mendukung pemerintah dapat membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi kebencanaan di Kecamatan Hamparan Perak, Kepala Desa menjelaskan bahwa dukungan pemerintah dapat terlihat melalui keterlibatan langsung pemerintah dalam membantu masyarakat serta memberikan informasi yang jelas mengenai potensi bencana banjir. Pemerintah desa berusaha memberikan dukungan dengan melakukan berbagai upaya seperti koordinasi dengan perangkat desa, mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan arahan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi banjir. Melalui sikap mendukung tersebut, masyarakat dapat merasakan adanya perhatian dari pemerintah sehingga menumbuhkan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan mengenai mitigasi bencana banjir.

“Kalau untuk informasi, alhamdulillah kelompok-kelompok ini, warganya udah gak takut banjir. Kenapa saya bilang? Biasa deh. Udah, bukan. Yang pertama, kalau dia banjir nasional semalam, kena lah kita. Tapi tidak semua. Hanya 21 dusun, 5 dusun lah yang kena. Jadi berarti lima, enam belas dusunnya enggak ya. Kita buatlah tujuh, lebih lah ya tujuh. Tapi ya tidak semua. Tapi kalau untuk mereka merasakan, masyarakat ini merasakan,

tidak ada, sudah nyaman lah mereka. Maksudnya kalau hujan lebat pun, tidur pulas lah. Tidak merasa lagi ada takut banjir. Kecuali memang banjirnya nasional ya”.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana sikap pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana kepada masyarakat yang kurang responsif atau bersikap skeptis, Kepala Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa tetap berusaha menyampaikan informasi secara berulang dan dengan pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. Pemerintah desa biasanya memanfaatkan peran kepala dusun serta tokoh masyarakat untuk membantu menyampaikan kembali informasi kepada warga agar pesan yang diberikan dapat lebih mudah diterima. Selain itu, pemerintah desa juga mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan seperti gotong royong membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mitigasi bencana banjir. Dengan cara tersebut, pemerintah desa berharap masyarakat yang sebelumnya kurang responsif dapat menjadi lebih sadar dan lebih peduli terhadap upaya pencegahan bencana banjir di lingkungan mereka.

“Jadi disini kan kita selalu katakan dan bahkan kita remusawarkan desa tentang gimana sikap kita untuk menulangi bahaya banjir, itu yang pertama. Perpajangan kepala dusun di setiap dusun itulah yang memberikan cermin kepada masyarakat, menyatakan aman-nyaman jika memang ada hujan deras.mAlhamdulillah, sampai dengan sekarang terus pangkau kuning ini tidak ada banjir, kecuali ya banjir semalam ya. Karena semalam banjir kan banjir nasional. Seluruhnya kena. Jadi, alhamdulillah masyarakat sekarang, saya katakan, Acu tidak acu, tetapi sekarang mereka sudah melihat gini reja-reja kita. Tapi ya memang saya rasa lebih indah lagi beban kepala desa ini lebih beratkan langsung sama masyarakat. Beda dengan pimpinan-pimpinan yang lain”.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana sikap positif pemerintah terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, Kepala Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi lingkungan serta lebih siap menghadapi potensi banjir. Pemerintah desa berusaha membangun sikap positif dengan mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan gotong royong, serta memperhatikan kondisi saluran air di sekitar permukiman. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan arahan dan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran bersama dalam mencegah terjadinya banjir. Melalui sikap positif tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat menunjukkan perubahan perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir.

“Kalau dalam positif, ya alhamdulillah positif kita hadapi segala cara kita buat termasuk pembersihan sungai-sungai yang ada alirannya ke laut, aman yang ada. Ini kan kita mengurangi ke laut ini semua. Dekat, karena ada serlupang kebun, dekat dengan apa ke laut. Jadi Pemerintah tingkat 2, khusus di Pemkap itu sangat respon. Nah inilah contohnya. Kita mengurutkan alat berat, dua kali tidak ada penolakan. Selalu mendukung untuk kepentingan masyarakat yang ada di Deli Serdang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menunjukkan sikap positif dalam menghadapi perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap bencana banjir dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti membersihkan sungai yang menjadi jalur aliran air menuju laut serta menjaga kondisi saluran air agar tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap upaya yang

dilakukan oleh pemerintah desa, seperti menyediakan alat berat untuk membantu proses pembersihan sungai. Dukungan dan kerja sama tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan serta lebih siap dalam menghadapi potensi bencana banjir.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana pemerintah memastikan adanya kesetaraan dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana kepada seluruh lapisan masyarakat, Kepala Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun wilayah tempat tinggal. Informasi mengenai mitigasi bencana biasanya disampaikan melalui kepala dusun sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa agar pesan yang diberikan dapat menjangkau seluruh warga di setiap dusun. Selain itu, pemerintah desa juga memanfaatkan kegiatan pertemuan warga dan kegiatan sosial lainnya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui cara tersebut, pemerintah desa berusaha memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menerima informasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir.

“Jangankan dimitigasi. Sedangkan dalam bencana aja waktu tahun 2025 semalam, kita adil, kita buka dapur seluruh yang mana dusun yang ada. Dalam tanda kategori kutip, dia tidak terlalu memerlukan biaya besar. Sekelas desa kelompok kebun, 21 dusun, ada 7 kita yang benak semalam. Tidak terlalu besar lah, kalau 8 juta termasuk aja ya. Alhamdulillah, di sini kelompok gebur, saya, kepala desa, berserta jajara, berserta Babin Katimas, Babinsa, LPE, BPD, berserta Bidan Desa, dan lain-lain, siap sinergi. Siap

sinergi untuk membantu masyarakat. Bahkan, Masyarakat yang di luar, yang penting dia KTP Kelumpang Kebun, kita tetap bantu. Walaupun keberadaannya di luar. Kenapa? Maka kan saya katakan selalu kepada masyarakat, kalaulah memang pindah, pindahlah alamatnya. Pindahlah status ke wargaan mana. Tapi gitu pun, setiap KTP, sekali lagi, setiap KTP atau keluarga Kelumpang Kebun”,

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana maupun dalam penanganan ketika bencana terjadi. Pemerintah desa memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat secara merata tanpa membedakan latar belakang maupun wilayah tempat tinggal warga. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah desa yang membuka dapur umum serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di beberapa dusun. Selain itu, pemerintah desa juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti perangkat desa, Babinkamtibmas, Babinsa, BPD, dan tenaga kesehatan desa untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Melalui kerja sama dan sikap yang adil tersebut, pemerintah desa berusaha memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh perhatian dan bantuan yang sama ketika menghadapi bencana banjir.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana sikap kesetaraan dalam komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keselamatan, Kepala Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa berusaha menjalin komunikasi yang terbuka dan tidak membedakan kedudukan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, serta masukan terkait kondisi lingkungan dan upaya pencegahan bencana banjir. Melalui komunikasi yang bersifat setara tersebut,

masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti gotong royong membersihkan saluran air, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti arahan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana banjir.

“Sekali lagi, ya memang disini perpanjangan tangan Kepala Dusun-Kepala Dusun lah yang berat perannya. 21 dusun, Alhamdulillah, masyarakatnya sekarang sudah tidak ada lagi takut dengan namanya bahaya banjir, irisnya gelombang kebun ini. Kenapa? Karena mereka tahu, begitu siaga satu, siaga semua. Jadi Alparator Pemerintah Desa, terkhusus saya, beserta Kepala Dusun, dan Nyala Elei, bisa diri untuk bagaimana rasa aman, nyaman masyarakat. terbukti kemarin kita selesaikan semua permasalahan yang ada tentang banjir”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap kesetaraan dalam komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya keselamatan menghadapi bencana banjir. Peran kepala dusun sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa menjadi sangat penting dalam menyampaikan informasi dan mengoordinasikan masyarakat di setiap wilayah. Melalui komunikasi yang terbuka serta kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, masyarakat menjadi lebih siap dan tidak lagi merasa terlalu khawatir terhadap ancaman banjir karena telah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang setara dan koordinasi yang baik mampu membangun rasa aman serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Hampan Perak telah berjalan dengan cukup baik melalui peran kepala desa dan kepala dusun sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa juga berupaya menciptakan rasa aman dan nyaman melalui koordinasi, gotong royong, serta pemeliharaan lingkungan seperti saluran air. Namun, efektivitas komunikasi tersebut masih sangat bergantung pada keaktifan kepala dusun dalam menyampaikan informasi dan menggerakkan masyarakat. Apabila peran tersebut tidak berjalan secara optimal, maka penyampaian informasi dan partisipasi masyarakat juga menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, konsistensi komunikasi, serta keterlibatan seluruh perangkat desa agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara menyeluruh.

4.4.3 Hasil Wawancara Narasumber 3

Ketika peneliti bertanya, bagaimana bentuk keterbatasan pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir kepada masyarakat di Kecamatan Hampan Perak, narasumber menjawab informasi yang diberikan mencakup langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan saat banjir terjadi, sehingga masyarakat lebih memahami situasi dan terdorong untuk ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi bencana

“Menurut kami sebagai masyarakat, pemerintahan sudah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi soal banjir. Misalnya lewat kepala dusun, pertemuan warga atau grup WhatsApp. Tapi kadang informasi yang

disampaikan masih belum rutin dan belum rata sampai ke semua warga. Jadi kami berharap penyampaian informasi bisa lebih cepat, jelas, dan dilakukan secara berkala supaya masyarakat bisa lebih siap sebelum banjir datang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Kecamatan Hampan Perak telah menunjukkan adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait mitigasi bencana banjir melalui berbagai saluran seperti kepala dusun, pertemuan warga, dan media *WhatsApp*.

Ketika peneliti menanyaka, bagaimana keterbatasan komunikasi memengaruhi penyampaian informasi mitigasi bencana kepada masyarakat di Kecamatan Hampan Perak, narasumber menjelaskan bahwa keterbatasan komunikasi seperti kurangnya akses informasi dampaknya cukup terasa bagi mereka, karena banyak warga jadi tterlambat tahu soal peringatan banjir.

“Kalau komunikasi dari pemerintah terbatas, dampaknya cukup terasa bagi kami. Karena banyak warga jadi terlambat tahu soal peringatan banjir. jalur evakuasi atau langkah yang harus dilakukan saat air mulai naik sehingga masyarakat sering hanya mengandalkan informasi dari tetangga atau pengalaman sendiri padahal kalau informasi resmi lebih lancar dan mudah dipahami tentu kesiap siagaan warga bisa jauh lebih baik”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, keterbatasan komunikasi dari pemerintah di Kecamatan Hampan Perak berdampak cukup signifikan terhadap menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir kepada masyarakat. Kurangnya kelancaran dan kejelasan informasi menyebabkan sebagian warga terlambat mengetahui peringatan banjir, jalur evakuasi, serta langkah yang harus dilakukan saat kondisi darurat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah di Kecamatan Hampan Perak telah menunjukkan empati terhadap masyarakat

yang terdampak banjir melalui tindakan nyata seperti, turun langsung ke Lokasi, memberikan bantuan, serta mendengarkan keluhan warga. Sikap tersebut membuat warga merasa diperhatikan dan dihargai.

Ketika peneliti bertanya bagaimana sikap empati pemerintah memengaruhi masyarakat terhadap pesan mitigasi bencana di kecamatan Hampan Perak, narasumber menjelaskan bahwa, ketika pemerintah menunjukkan rasa empati yang nyata kepada masyarakat, mereka menjadi lebih percaya dan mau mendengarkan pesan-pesan mitigasi yang disampaikan. Hal ini karena masyarakat merasa pemerintah benar-benar peduli terhadap kondisi mereka, bukan hanya sekedar memberikan imbauan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima arahan dan terdorong untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir.

“Kalau pemerintahan menunjukkan empati yang nyata kepada masyarakat, biasanya kami jadi lebih percaya dan tidak mau mendengarkan pesan-pesan mitigasi yang disampaikan. Karena kami merasa pemerintahan benar-benar peduli dengan kondisi kami. bukan hanya sekedar memberi imbauan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima arahan dan lebih terdorong untuk ikut menjaga kesiagaan menghadapi banjir”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap empati pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pesan mitigasi bencana. Empati yang ditunjukkan secara nyata mampu membuat masyarakat lebih menerima informasi serta lebih aktif dalam mengikuti arahan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir.

Ketika peneti bertanya, bagaimana bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir di Kecamatan Hampan Perak, narasumber menjawab dukungan pemerintah terlihat melalui

sosialisasi, memberikan informasi, peringatan dini, serta penyediaan bantuan darurat dan arahan kepada masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan saat banjir terjadi.

“Menurut kami, dukungan pemerintahan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir bisa dilihat dari sosialisasi, pemberian informasi, peringatan dini, penyediaan bantuan darurat, serta arahan tentang apa yang harus dilakukan saat banjir. Namun kami berharap dukungan itu tidak hanya saat banjir terjadi, melainkan juga dapat bentuk pelatihan simulasi, dan perbaikan fasilitas seperti drainasi atau tempat evakuasi agar masyarakat lebih siap secara nyata”.

Berdasarkan hasilwawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, dukungan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir. Dukungan yang diberikan melalui informasi, bantuan, dan arahan mampu membantu masyarakat lebih siap, namun perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan perbaikan fasilitas agar kesiapsiagaan masyarakat menjadi lebih maksimal.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana sikap mendukung pemerintah dapat membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi kebencanaan di Kecamatan Hamparan Perak, narasumber menjawab bahwa ketika pemerintah menunjukkan sikap yang mendukung, hadir di tengah masyarakat, serta memberikan informasi yang jelas dan konsisten, dengan begitu masyarakat merasa lebih aman dan percaya terhadap informasi yang disampaikan. Hal tersebut karena masyarakat melihat adanya perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah, sehingga mereka menjadi lebih tenang dan tidak mudah panik saat menghadapi ancaman banjir.

“Saat pemerintahan menunjukkan sikap yang mendukung, hadir di tengah masyarakat dan memberikan informasi yang jelas serta konsisten, kami sebagai warga jadi merasa lebih aman dan percaya terhadap informasi kebencanaan yang disampaikan karena kami melihat ada perhatian dan tanggung jawab sebagai dari pemerintah sehingga masyarakat juga lebih tenang dan tidak mudah panik saat menghadapi ancaman banjir”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap mendukung pemerintah memiliki peran penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi kebencanaan. Dukungan yang menunjukkan melalui kehadiran langsung dan penyampaian informasi yang jelas mampu meningkatkan ketenangan serta kepercayaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

Ketika peneliti bertanya, bagaimana sikap pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi masyarakat yang kurang responsif atau skeptis di Kecamatan Hampan Perak, narasumber menjawab bahwa pemerintah perlu bersikap sabar, tidak menyalahkan masyarakat, serta terus memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini karena tidak semua masyarakat langsung memahami dan percaya terhadap informasi mitigasi, sehingga pendekatan yang ramah dan penyampaian yang berulang dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

“Menurut pandangan kami, saat menghadapi masyarakat yang kurang responsif atau masih skeptis, pemerintah sebaiknya tetap sabar tidak menyalahkan warga dan terus memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami karena tidak semua masyarakat langsung

percaya atau paham soal imitigasi jadi pendekatan yang ramah dan berulang biasanya lebih efektif daripada hanya memberi peringatan sekali lalu selesai. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap” pemerintah yang sabar, komunikatif, dan tidak menyalahkan masyarakat sangat penting dalam menghadapi masyarakat yang kurang responsif atau skeptis. Pendekatan yang sederhana dan berulang kali mampu membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong masyarakat untuk lebih menerima informasi mitigasi bencana.

Ketika peneliti bertanya bagaimana sikap positif pemerintah terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak, narasumber menjawab bahwa sikap positif pemerintah yang terus memberikan semangat dan dukungan membuat masyarakat lebih termotivasi untuk berubah. Masyarakat mulai lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, mengikuti arahan saat banjir, serta lebih waspada terhadap tanda-tanda bencana, karena merasa bahwa setiap perubahan yang dilakukan memiliki peran penting dalam mengurangi risiko banjir.

“Kalau pemerintah punya sikap positif dan terus memberi semangat kepada masyarakat, kami merasa lebih termotivasi untuk berubah. Misalnya, mulai peduli dengan kebersihan lingkungan, mengikuti arahan saat banjir, dan lebih waspada terhadap tanda-tanda bencana. Karena, dukungan yang positif dari pemerintah bisa membuat masyarakat merasa membawa perubahan kecil yang dilakukan bersama memang penting untuk mengurangi risiko banjir”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap positif pemerintah memiliki pengaruh positif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih peduli dan siap dalam menghadapi bencana banjir.

Dukungan yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana.

Ketika peneliti bertanya, bagaimana pemerintah memastikan adanya kesetaraan dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak, narasumber menjawab bahwa, pemerintah perlu memastikan informasi benar-benar disampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, baik yang tinggal di dekat sungai, di daerah pelosok, maupun berbagai kelompok seperti orang tua, ibu rumah tangga, dan pemuda. Penyampaian informasi juga harus dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau agar tidak ada masyarakat yang merasa tertinggal dalam memperoleh informasi.

“Menurut kami, pemerintahan perlu memastikan bahwa informasi mitigasi banjir benar-benar sampai ke semua lapisan masyarakat tanpa membedakan. baik warga yang ditinggal dekat sungai, di pelosok, orang tua, ibu rumah tangga, maupun pemuda. Karena selama ini kadang ada warga yang merasa kurang mendapat informasi. Jadi penyampaian harus dilakukan secara merata, dengan cara yang mudah dijangkau oleh semua orang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesetaraan dalam penyampaian informasi mitigasi bencana sangat penting agar seluruh masyarakat memperoleh informasi secara adil dan menyeluruh. Penyampaian yang merata dan mudah diakses mampu meningkatkan pemahaman serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

Ketika peneliti bertanya, bagaimana sikap kesetaraan dalam komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak, narasumber menjawab bahwa,

ketika pemerintah berkomunikasi secara setara dengan masyarakat, menghargai pendapat warga, serta tidak hanya memberikan instruksi sepihak, masyarakat menjadi lebih mau terlibat dalam berbagai kegiatan kesiapsiagaan seperti gotong royong, rapat lingkungan, dan mengikuti arahan evakuasi. Hal ini karena masyarakat merasa dilibatkan dan dianggap penting dalam upaya bersama menghadapi bencana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap kesetaraan dalam komunikasi pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Komunikasi yang menghargai dan melibatkan masyarakat mampu mendorong keterlibatan aktif dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Hampan Perak menilai komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup terbuka dan memberikan dampak positif, terutama dalam hal penyampaian informasi serta dukungan saat terjadi bencana. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti informasi yang belum merata, penyampaian yang belum konsisten, serta keterbatasan komunikasi yang menyebabkan sebagian masyarakat terlambat menerima informasi. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan dalam bentuk empati pemerintah yang tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya jangka panjang seperti pelatihan, simulasi, dan perbaikan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan agar masyarakat dapat lebih memahami

informasi mitigasi bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Keterbukaan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, keterbukaan dalam komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Hampan Perak telah melalui upaya penyampaian informasi mengenai potensi banjir kepada masyarakat. narasumber tersebut umumnya diperoleh dari instansi terkait, kemudian diteruskan kepada pemerintah desa dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk memberikan informasi secara terbuka, agar masyarakat dapat mengetahui potensi risiko bencana banjir yang akan terjadi.

Namun dalam praktiknya, keterbukaan komunikasi yang dilakukan masih memiliki keterbatasan, terutama karena informasi tidak disampaikan secara langsung kepada masyarakat, melainkan melalui perantara seperti pemerintah desa atau tokoh masyarakat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan informasi yang diterima masyarakat tidak selalu utuh atau mengalami keterlambatan dalam penyampaian informasi mitigasi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan yang dilakukan masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam praktik teori komunikasi, keterbukaan merupakan salah satu unsur penting dalam efektivitas komunikasi karena berkaitan dengan transparansi informasi serta kemudahan akses bagu penerima pesan. Keterbukaan dalam

komunikasi mitigasi bencana ditunjukkan melalui penyampaian informasi yang memadai tentang potensi bencana, sehingga masyarakat dapat memahami risiko yang ada dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (Kurniawati, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan dalam komunikasi mitigasi bencana tidak hanya dilihat dari adanya penyampaian informasi, tetapi juga dari bagaimana informasi tersebut dapat di terima secara langsung, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, keterbukaan komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif karena masih bergantung pada jalur komunikasi tidak langsung dan belum didukung oleh sistem penyampaian informasi yang lebih luas dan merata.

4.5.2 Empati

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah menunjukkan sikap empati dalam komunikasi mitigasi bencana melalui berbagai tindakan nyata di lapangan, seperti mengirimkan tim kelokasi yang rawan banjir, menyediakan bantuan logistic, serta mendirikan posko bagi masyarakat yang terdampak. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi saja, tetapi juga berusaha hadir secara langsung dalam membantu masyarakat menghadapi situasi bencana banjir.

Sikap empati ini juga terlihat dari cara pemerintah menyampaikan informasi mitigasi bencana dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Pemerintah juga berupaya menggunakan pendekatan yang

lebih dekat dengan masyarakat, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memperhatikan aspek emosional masyarakat.

Dalam teori komunikasi, empati merupakan kemampuan komunikator untuk memahami kondisi, perasaan, serta kebutuhan komunikan. Empati dalam komunikasi mitigasi terlihat dari upaya pemerintah untuk menyadarkan warga atas bahaya bencana dengan pendekatan yang sesuai kondisi masyarakat, sehingga pesan dapat diterima dengan baik (Kurniawati, 2020). ketika masyarakat merasa diperhatikan dan dipahami, maka mereka akan cenderung lebih terbuka dalam menerima informasi yang disampaikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap empati yang telah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Masih banyak terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap upaya mitigasi yang dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan bencana masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa empati yang ditunjukkan pemerintah sudah cukup baik dalam bentuk tindakan nyata. Namun, masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk lebih optimal.

4.5.3 Sikap Mendukung

Berdasarkan hasil penelitian, sikap mendukung dalam komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah terlihat melalui berbagai upaya seperti pemberian edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta ajakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Pemerintah juga

berupaya memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum dan saat bencana terjadi. Sikap mendukung ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga berusaha menciptakan kondisi yang mendorong masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi bencana. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang bersifat membangun, seperti imbauan untuk menjaga lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan saat musim hujan.

Dalam perspektif teori komunikasi, sikap mendukung diwujudkan melalui pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana yang membantu masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana banjir (Kurniawati, 2020). komunikasi yang mendukung akan membuat masyarakat merasa dihargai dan lebih terbuka dalam menerima informasi serta terlibat dalam komunikasi.

Namun dalam pelaksanaannya, dukungan yang diberikan pemerintah masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya program yang secara langsung melibatkan masyarakat, seperti belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana masih rendah. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap mendukung yang dilakukan pemerintah sudah terlihat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur, berkelanjutan, dan mampu melibatkan masyarakat secara aktif.

4.5.4 sikap Positif

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah menunjukkan sikap positif dalam komunikasi mitigasi bencana melalui upaya yang terus dilakukan dalam

memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah berusaha menyampaikan pesan mitigasi bencana dengan cara yang tidak menimbulkan kepanikan, tetapi lebih menekankan pada pentingnya kesiapsiagaan. Sikap positif ini tercermin dari pemerintah dalam memberikan pemahaman bahwa bencana banjir dapat diantisipasi melalui persiapan yang baik. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya merasa khawatir, tetapi juga terdorong untuk mengambil langkah-langkah pencegahannya.

Dalam teori komunikasi, sikap positif dalam komunikasi mitigasi ditunjukkan melalui upaya pemerintah yang ditunjukkan melalui upaya pemerintah yang menekankan bahwa upaya perlu dilakukan agar masyarakat siap siaga, sehingga membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat (Kurniawati, 2020). Sikap ini penting karena, dapat mempengaruhi cara penerimaan pesan dalam memahami informasi yang lebih mudah diterima dan dapat mendorong perubahan sikap yang lebih pada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap positif yang ditunjukkan pemerintah belum sepenuhnya diikuti oleh respon masyarakat yang sama. Masih terdapat masyarakat yang kurang serius dalam menanggapi informasi mitigasi bencana, sehingga pesan yang disampaikan belum memberikan dampak yang maksimal. Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa sikap positif dalam komunikasi mitigasi bencana sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah, namun perlu didukung dengan strategi komunikasi yang lebih persuasif agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

4.5.5 Kesetaraan

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Hamparan Perak masih cenderung bersifat satu arah. Pemerintah berperan sebagai penyampaian informasi, sedangkan masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima informasi tanpa adanya interaksi yang intens. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam komunikasi belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat sepenuhnya masih belum melibatkan dalam proses komunikasi, baik dari penyampaian pendapat maupun dalam kegiatan mitigasi bencana. Hal ini menyebabkan komunikasi yang terjadi belum mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Dalam perspektif teori komunikasi, kesetaraan dalam komunikasi mitigasi bencana terlihat dari penyampaian informasi secara merata, karena masyarakat tidak memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi, sehingga semua lapisan masyarakat harus mendapatkan akses komunikasi yang sama (Kurniawati, 2020). Masyarakat cenderung bersikap pasif dan hanya mengandalkan pemerintah dalam menghadapi bencana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesetaraan dalam komunikasi mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pendekatan komunikasi yang lebih partisipasi dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses mitigasi bencana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir di Kecamatan Hamparan Perak maka dapat disimpulkan bahwa, komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam membentuk kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Dari aspek keterbukaan, pemerintah telah berupaya menyampaikan informasi mengenai potensi bencana melalui koordinasi dengan BPBD, pemerintah desa, serta Kecamatan. Namun penyampaian informasi masih bersifat bertahap dan tidak langsung kepada masyarakat, sehingga pesan yang diterima seringkali tidak maksimal.
2. Dari aspek keterbatasan komunikasi, masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi mitigasi bencana. Komunikasi yang digunakan masih bersifat manual, seperti melalui pengeras suara masjid. Selain itu, belum adanya teknologi peringatan dini menjadi faktor yang menghambat efektivitas komunikasi kepada masyarakat secara luas.
3. Dari aspek empati, pemerintah telah menunjukkan kepedulian melalui berbagai tindakan seperti mengirimkan satgas, memberikan bantuan logistik, serta membangun posko saat terjadi bencana. Namun, empati tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana.

4. Dari aspek sikap mendukung, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi, edukasi, serta pembentukan pos satgas. Akan tetapi, program seperti Desa Tangguh Bencana (DESTANA) belum sepenuhnya di buat di Kecamatan Hampan Perak.
5. Dari aspek sikap positif dan kesetaraan, komunikasi yang dilakukan pemerintah sudah mengarah pada upaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat masih rendah, terlihat kurangnya keterlibatan dalam kegiatan mitigasi seperti gotong royong dan pembersihan lingkungan

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, komunikasi mitigasi bencana di Kecamatan Hampan Perak masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi sistem komunikasi, keterbatasan sarana, maupun rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, peningkatan strategi komunikasi yang lebih efektif dan partisipasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi mitigasi bencana dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang lebih modern, seperti sistem peringatan dini berbasis digital agar informasi dapat diterima oleh masyarakat secara cepat dan merata.

2. Bagi BPBD, perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam kondisi yang normal.
3. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan dapat segera membentuk program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) agar masyarakat lebih mandiri dan siap dalam menghadapi bencana.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan mitigasi bencana, seperti sosialisasi, gotong royong, serta menjaga lingkungan, sehingga dapat mengurangi risiko bencana banjir.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai strategi komunikasi mitigasi bencana berbasis teknologi, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Yuliana, N. (2023). Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Peserta Aksi Demonstrasi di Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro) Untirta. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(December), 162–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10285433>
- Aziz, M. H. (2023). Komunikasi Kebencanaan: Peran Dan Manfaat Pada Mitigasi. *Communications*, 5(1), 301–316. <https://doi.org/https://doi.org/Communications.5.1.2>
- Fahmid, & Syaugi, A. (2021). Ooda Loops: Concept Of Resilience Analysis And Strategic Management Of Msme Development During The Covid-19 Pandemic In East Java Province. *East Java Economic Journal*, 5(2), 170–182. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v5i2.68>
- Farihin, A. U. (2023). Meningkatkan Kesadaran Lingkungan melalui Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01(1), 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54396/mjd.v1i1.967>
- Faustyna, Rudianto, & Santoso, P. (2021). Pelatihan Komunikasi Krisis Masyarakat Lokal dalam Mengelola Keluhan Wisatawan saat Pandemi Covid19 untuk Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Lama Paluh Naga di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu. *Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 69–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.53299/bajpm.v1i2.41> Pelatihan
- Fernanda, D., & Harahap, M. S. (2024). Komunikasi Mitigasi Bencana Dalam Mengurangi Resiko Bencana Bagi Masyarakat Pasaman Barat. *Jurnal Keskap: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/keskap.v3i1.19136>
- Fitrah, A., Suroso, D. S. abi, & Asbi, A. M. (2020). Kesesuaian Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Tingkat Risiko Tsunami. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 11(2).
- Fitriani, D. N. (2023). Analisis Logika Dokumentasi Blasius Sudarsono Dari Perspektif Komunikasi. *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 9008(105), 87–97. <https://doi.org/10.55981/j.baca.2023.1129>
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i1.2694>
- Hasan, Z., Mahidin, Achmad, A., Irwansyah, M., & Aufaraihan, N. (2025). Kajian Literatur tentang Model Mitigasi Bencana Lanskap Pesisir di Kota Banda Aceh. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 17(2), 239–245. <https://doi.org/10.29244/jli.v17i2.61739>
- Husniawati, N., & Herawati, T. M. (2023). Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(23), 11–19.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33221/jikm.v12i01.1751>

- Izharsyah, J. R., Lubis, F. H., & Hardiyanto, S. (2020). Penguatan Pengabdian Dalam Penerapan Mitigasi Bencana Tanah Longsor Dan Banjir Di Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *Jurnal Hasil Pengabdian Masauarakat*, 4(2), 64–68.
- Kurniawati, D. (2020). Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana Communication on Disaster Mitigation as Community Precautions in Disaster Management. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Comunication Study*, 6(April), 51–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.3494>
- Marinda, R. D., & Muttaqin, H. (2025). Efektivitas Sosialisasi Mitigasi Bencana dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 322–331. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17958670> Efektivitas
- Nawi, R., & Herianto, D. (2020). Analisis Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara. *Journal Social Engagement*, 36–43.
- Nikmah, K. (2023). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Pada Mata Kuliah Studi Arsip Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. *Journal of Social Science and Education*, 04(01), 26–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5912>
- Permana, D. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.171>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Riskiono, S. D., Hamidy, F., & Ulfia, T. (2020). Sistem Informasi Manajemen Dana Donatur Berbasis Web Pada Panti Asuhan Yatim Madani. *Journal of Social and Technology for Community Service*, 1(1), 21–26. <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknobdimas>
- Rudianto, & Anshori, A. (2021). Komunikasi Organisasi Antar Budaya di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 11–19. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5301>
- Ruliana, P., & Lestari, P. (2019). *Teori Komunikasi* (P. Ruliana & P. Lestari (eds.)). Pt rajagrafindo persada.
- Sopacua, Y., & Salakay, S. (2020). Sosialisasi Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 7(1), 1–17.

<https://doi.org/https://doi.org/10.37535/101007120201>

- Suharyadi, E. (2025). *Kecamatan Hamparan Perak Dalam Angka Hamparan Perak District In Figures 2025* (A. Setiaji, I. Bani, & V. Ginting (eds.); Vol. 22). BPS Kabupaten Deli Serdang.
- Tanjung, R. S., Sikumbang, A. T., & Kustiawan, W. (2023). Strategi Komunikasi Taruna Siaga Bencana Dalam Mensosialisasikan Urgensi Mitigasi Bencana Di Kota Medan. *Jurnal Simbolika*, 8(2). <https://doi.org/10.31289/simbolika.v8i2.7163>
- Taslim, M., Pasaribu, A. J., & Samudra, A. A. (2024). Analisis Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Tangerang Selatan. *Open Journal Systems*, 18(1978), 2187–2202. <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v18i8.755>
- Wicaksono, R. H. I., & Husain, F. (2025). Gambaran Tingkat Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gunung Meletus Di Krb 1 Desa Tegalsruni Samiran Selo Boyolali. *Indonesian Journal of Public Health*, 3(4), 860–874.
- Yunia, A., Yulianti, W., Harwinda, A., & Pinariya, J. M. (2024). *Komunikasi Mitigasi Bencana Di Kota Industri Cilegon*. 4(2), 92–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/103004220231>

LAMMPIRAN



Dokumentasi Jalan Yang Sering Terjadinya Banjir Di Kecamatan Hampanan

Perak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2262/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 23 Desember 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : MUHAMMAD KUSMITRA
N P M : 2203110339
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : EFEKTIVITAS KOMUNIKASI MITIGASI
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah) BENCANA PEMERINTAH UNTUK
MENINGKATKAN KESAMPAIAGAN
MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI
BENCANA DI KEC. HAMPARAN PERAK

Pembimbing : Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 130.22.311 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Juni 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 07 Rajab 1447 H
27 Desember 2025 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

3. Pertinggal.

Dekan,

Asst. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menaruh surat agar dicabutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fisis.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsu.medan un.sumedan umsu.medan umsu.medan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 26 Januari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Muhammad Kusmitra
NPM : 2103110329
Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2162.../SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 27 Desember 2025 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Komunikasi Mitigasi bencana Pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kab. Hamparan Perak

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

Menyetujui
Pembimbing

Permohon,

(Dr. ANWAR ANSHORI S. S.S, M. I. Kom) (Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M. I. Kom) (Muhammad Kusmitra)

NIDN: 127048401

NIDN:





UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 203/UND/II.3.AU/UMSU-09/F/2026

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jum'at, 30 Januari 2026
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : R. 410 Gd. C FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Dc. AKHYAR ANSHORI, M.I.Kom.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
21	ATIQAH JAUIHARAH	2203110101	Dc. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	STRATEGI KOMUNIKASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. BAKRIE PASAMANI PLANTATION DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PERUSAHAAN
22	ELIT GUNAWA BANTJA KABANI	2203110988	ELVITA YENNI, S.S., M.Hum.	Assoc. Prof. Dr. LUTFI BASIT, S.Soc., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI PT. TASPEN CABANG MEDAN DALAM MENYOSIALISASIKAN KELENGKAPAN BERKAS PRA-PENSIUN PADA PUS PURNA TUGAS
23	FENI FADILLAH	2203110333	Assoc. Prof. Dr. LETYUA KHAIRANI, M.Si.	ABDURRAHMAN ZUHDI, S.I.Kom., M.I.Kom.	POLA KOMUNIKASI SANGGAR DIAMOND ENTERTAINMENT DALAM MELESTARKAN SENI TARI DAN BUDAYA SUMATERA UTARA DI ERA MODERNISASI
24	PASTYA HUMAIRA AHSANI	2203110143	Assoc. Prof. Dr. LUTFI BASIT, S.Soc., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	OPINI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM GERAKAN PANGAY MURAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
25	MUHAMMAD KUSMITRA	2203110359	Dr. FAZLA HANZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. SIGIT HARDYANTO, S.Soc., M.I.Kom.	EFEKTIVITAS KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA DI KEC. HAMPARAN PERAK

Medan, 10 Syaaban 1447 H
Medan, 29 Januari 2026 M
Dekan
(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)
STARS
UMSU



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Muhammad Kusmitra
NPM : 2203110339
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Efektifitas Komunikasi Mitigasi bencana Pemananlah untuk meningkatkan Keselamatan Masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hamparan Perak

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1)	06-1-2025	Consultasi dan Topik Penelitian	
2)	21-1-2025	bimbingan Proposal Penelitian	
3)	4-2-2025	bimbingan ACC Proposal Penelitian	
4)	9-2-2025	bimbingan Pedoman wawancara	
5)	12-2-2025	bimbingan Bab 4	
6)	16-3-2025	ACC BAB 4	
7)	20-3-2025	bimbingan bab 5	
8)	22-3-2025	ACC bab 5	
9)	30-3-2025	ACC sidang	

Medan,20.....

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN: 2003061240

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(Dr. ACHYAR ANSHORI, S.Sos., M. Kom.)
NIDN: 112048401

(Dr. Sigit Haryanto S.Sos., M. Kom.)
NIDN: 0112118002



DRAFT WAWANCARA TUGAS AKHIR

IDENTITAS PEWAWANCARA DENGAN BPBD KABUPATEN DELI SERDANG

Nama : Muhmmad Kusmitra
NPM : 2203110339
Prodi : Ilmu Komunikasi
Dosen Pembimbing : Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos., M.I.Kom
Judul : Efektivitas Komunikasi Mitigasi Bencana Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Di Kecamatan Hampan Perak
Lokasi : Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

SKR draft pedoman wawancara
15/9/2022
Sigit Hardiyanto

IDENTITAS NARASUMBER

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :

A. Keterbatasan

1. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana banjir kepada masyarakat di Kecamatan Hampan Perak?
2. Bagaimana keterbatasan komunikasi memengaruhi penyampaian informasi mitigasi bencana kepada masyarakat di Kecamatan Hampan Perak?

B. Empati

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menunjukkan empati terhadap kondisi dan pengalaman masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Hampan Perak?
2. Bagaimana sikap empati pemerintah memengaruhi masyarakat terhadap pesan mitigasi bencana di Kecamatan Hampan Perak?

C. Sikap Mendukung

1. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir?
2. Bagaimana sikap mendukung pemerintah dapat membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi kebencanaan di Kecamatan Hampan Perak?

D. Sikap Positif

1. Bagaimana sikap pemerintah dalam menyampaikan informasi mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi masyarakat yang kurang responsif atau skeptis?
2. Bagaimana sikap positif pemerintah terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak?

E. Kesetaraan

1. Bagaimana pemerintah memastikan adanya kesetaraan dalam penyampaian informasi mitigasi bencana kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Hampan Perak?
2. Bagaimana sikap kesetaraan dalam komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana banjir di Kecamatan Hampan Perak?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila merendehi surat ini agar diikutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 432/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 08 Ramadhan 1447 H
25 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kecamatan Hampan Perak
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Hampan Perak, atas nama :

Nama mahasiswa : MUHAMMAD KUSMITRA
N P M : 2203110339
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : EFEKTIVITAS KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA DI KEC. HAMPARAN PERAK

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIP. 0030017402





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila membaca surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 563/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Lampiran : -,-

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 Ramadhan 1447 H

11 Maret 2026 M

Kepada Yth : Kepala Desa Klumpang Kebun
Kecamatan Hampan Perak
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hampan Perak, atas nama :

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD KUSMITRA**
N P M : 2203110339
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **EFEKTIVITAS KOMUNIKASI MITIGASI
BENCANA PEMERINTAH UNTUK
MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN
MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI
BENCANA DI KEC. HAMPARAN PERAK**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Karya Asih No.03 Lubuk Pakam Kode Pos-20514

Telepon. +62 811-6782-022

Pos-el: bpbdd@deliserdangkab.go.id Laman: bpbdd.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 11 Maret 2026

Nomor : 000/198/BPBD/III/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian dan Wawancara

Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 432/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang menyetujui dan memberikan izin penelitian serta wawancara kepada mahasiswa atas nama:

- Nama Mahasiswa : Muhammad Kusmitra
- Npm : 2203110339
- Program Studi : Ilmu Komunikasi
- Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
- Judul Skripsi : Efektivitas Komunikasi Mitigasi Bencana Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Di Kec. Hamparan Perak

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Deli Serdang

Sekretaris



Agus Salim Pane, SP

NIP. 19760114 199602 1 003



UNMSU
Unggul Cerdas Berprestasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN PANGULAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 639/LUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Tempat : Aula FISIP UNSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB



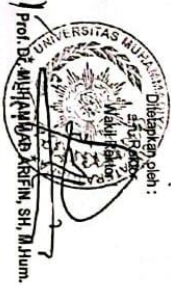
SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
31	ELDA H. SITI MARWAH MARRPANG	2203110020		Dr. FAZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	REPRESENTASI MAKNA KEHILANGAN DALAM FILM DRAWING CLOSER KARYA TAKAHIRO MIKI DAN FILM LOVE LIKE THE FALLING PETTALS KARYA KEISUKE UYAMA
32	RISFKA DWI ANISYAH	2203110049		NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. FAZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	REPERESNTASI CITRA POLITIK BOBBY NASUTION MELALUI FEED INSTAGRAM PADA AKUN @POSMETRO_MEDAN
33	MUHAMMAD KUSMINTRA	2203110339		Assec. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	EFEKTIVITAS KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA DIKEC. HAMPARAN PERAK
34	ZKRI ALFKRI ARAFIAT LUBIS	2203110380		Assec. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	Dr. FAZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	M.I.Kom	PERSEPSI PEMERU TENTANG KONTEN PEMASARAN DIGITAL PADA ACUIN INSTAGRAM @MAE_FOODSHOP
35	TATSBITA AJMAL TIJANI	2203110286		Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	Assec. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	PENGARUH PEMBERTAHAN KASUS KTRACUNAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN SISWA SMA ABDI NEGARA BINJAI

No.ulis Sidang:

Medan, 12 Syawal 1447 H

31 Maret 2026 M



Assec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, SISP.



Assec. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Muhammad Kusmitra
Tempat Tanggal Lahir : Klumpang Kebun
NPM : 220310339
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Klumpang Kebun Dusun V Telaga Sari
Anak Ke : 1 dari 4 Bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : Syawal
Ibu : Inda Yani
Alamat : Klumpang Kebun Dusun V Telaga Sari

Pendidikan Formal

1. Tamatan SD Negeri 106156
2. Mts Tarbiyah Islamiah
3. SMK Tarbiyah Islamiah
4. Terdaftar Sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Komunikasi Tahun 2022

Medan, April 2026

Muhammad Kusmitra